





KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan (LKj) Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Balikpapan dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan ini menguraikan informasi terkait pencapaian kinerja, kendala dan upaya harus dilakukan dalam rangka pencapaian target Tahun 2025.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025. Secara umum target indikator kinerja yang ditetapkan pada periode Triwulan III tahun 2025 telah dicapai sesuai target yang ditetapkan. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Balikpapan di masa mendatang.

Ungkapan terimakasih kepada seluruh pihak dan jajaran pegawai Balai KIPM Balikpapan yang telah membantu dan mendukung pencapaian kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan III tahun 2025.

Kami menyadari laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu saran, tanggapan maupun masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya.

Balikpapan, 10 Oktober 2025

Kepala Balai KIPM Balikpapan

Balai KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DABI
KEAMANAN HASIL PERKARAN
BALIKPAPAN

Eko Sulystianto



DAFTAR ISI

			Hal
KATA PE	ENGA	ANTAR	1
DAFTAR	ISI		2
DAFTAR	TAE	BEL	3
DAFTAR	GAM	MBAR	4
RINGKA	SAN I	EKSEKUTIF	5
BAB I.	PEN	NDAHULUAN	
	1.1	LATAR BELAKANG	9
	1.2	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
	1.3	STRATEGI ORGANISASI	12
	1.4	SISTEMATIKA PENYAJIAN	13
BAB II.	PER	RENCANAAN KINERJA	
	2.1	VISI DAN MISI	14
	2.2	SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	15
	2.3	PENGUKURAN KINERJA	18
BAB III.	AKU	JNTABILITAS KINERJA	
	3.1	CAPAIAN KINERJA	19
	3.2	ANALISIS DAN EVALUASI	21
	3.3	REALISASI ANGGARAN	44
	3.4	EFISIENSI ANGGARAN	46
BAB IV.	PEN	NUTUP	
	4.1 k	KESIMPULAN	48
	4.2 F	REKOMENDASI	49
LAMPIRA	ΔN		50



DAFTAR TABEL

	Ha
Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2025	7
Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan BKIPM Balikpapan	
Triwulan III Tahun 2025	. 16
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan III Tahun 2025	. 19
Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan	
Triwulan III Tahun 2025	. 22
Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan	
Triwulan III Tahun 2025	. 29
Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan	
Triwulan III Tahun 2025	. 31
Tabel 7. Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM,	
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	40
Tabel 8. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	. 41
Tabel 9. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2025	45
Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan III Tahun 2025	45



DAFTAR GAMBAR

Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi BKIPM Balikpapan11
Gambar 2. Peta Strategis BKIPM Balikpapan Tahun 202516
Gambar 3. Dasboard Capaian IK dan IKU Pada Sistem Aplikasi Kinerjaku
Tahun 202519
Gambar 4. Kegiatan Inspeksi CPIB dan CBIB di Pembudidayaan Ikan23
Gambar 5. Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan25
Gambar 6. Sertifikasi SKP di Unit Pengolahan Ikan melalui inspeksi online dan
pemenuhan dokumen pendukung pada website SKP online
Gambar 7. Perbandingan ekspor lima komoditi dominan selama Triwulan III
Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025
Gambar 8. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan III Tahun 202537
Gambar 9. Penyampaian hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP
Triwulan III Tahun 202543
Gambar 10. Tangkap Layar Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan III
Pada Website https://spanint.kemenkeu.go.id/46



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) BKIPM Balikpapan Triwulan III Tahun 2025 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan III Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BKIPM Balikpapan Tahun 2025 untuk mencapai kondisi yang diinginkan sebagai suatu *outcome / impact* dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan BKIPM Balikpapan selama Triwulan III Tahun 2025.

Pada tahun 2025 Balai KIPM Balikpapan mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan secara triwulanan, semester dan tahunan. Pencapaian atas target indikator kinerja menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan pada periode Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 113.88 % dengan kategori istimewa, sama kategori capaian Triwulan III Tahun 2024. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian sasaran kegiatan dan target Indikator Kinerja Kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Balai KIPM Balikpapan pada periode Triwulan III tahun 2025 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 14 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025, terdapat 6 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target dan 8 Indikator Kinerja yang tidak dinilai realisasinya pada Triwulan III, karena target pencapaian dilakukan secara semester atau tahunan.

Uraian Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target adalah sebagai berikut :

- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan
- 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi



standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan

- 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan
- 4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan
- Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan
- 6. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup BKIPM Balikpapan

Uraian Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak dinilai capaiannya pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan
- 2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan
- 3. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan
- 4. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup BKIPM Balikpapan
- 5. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan
- 6. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan
- 7. Penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan
- 8. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup BKIPM Balikpapan



			Tahun 2025				
Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target TW. III	Realisasi TW. III	%	
SK 1. Tei	selenggaranya pengendalian dan pengawasan i	nutu hasil	kelautan pe	erikanan			
IK 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	70	120	120	
IK 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	70	120	120	
IK 3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan	%	99	99	100	101,01	
Lanjutan	SK 2. Terselenggaranya pengendalian sistem ja konsisten sesuai standar	minan mu	itu dan kear	nanan hasil	perikanan y	/ang	
IK 4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan	%	75	-	-		
IK 5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan	%	75	-	-	-	
	ntakelola pemerintahan yang efektif, lincah dan a engawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	kuntabel	dalam bidar	ng pengenda	alian dan		
IK 6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	92	-	-	-	
IK 7	Nilai Kinerja Perencaan Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	71.5	-	-	-	
IK 8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	%	100	-	-	-	
IK 9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan	Indeks	87	-	-	-	
IK 10	Penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	Indeks	86	-	-	-	
IK 11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	%	85	85	100	117.65	
IK 12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan	%	76	76	100	120	



			Tahun 2025				
Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target TW. II	Realisasi TW. II	%	
IK 13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	-	-	-	
IK 14	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	88	88	92,06	104,61	

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan III Tahun 2025 Lingkup BKIPM Balikpapan

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

Capaian Kinerja keuangan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III telah terealisasi sebesar Rp. 3.0222.774,439,- atau sebesar 52.13 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.315.049.000,-. Anggaran Balai KIPM Balikpapan tahun 2025 mengalami pemblokiran anggaran sebesar Rp. 1.341.238.000,-. Namun pemblokiran anggaran ini tidak mempengaruhi capaian kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan III tahun 2025, hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 113.88 %, dimana kegiatan masih tetap terlaksana dengan baik dengan anggaran yang tersedia.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Balikpapan merupakan salah satu UPT BPPMHKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Balikpapan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Balikpapan serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Balikpapan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;



- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Balai KIPM Balikpapan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai KIPM Balikpapan sejumlah 29 ASN (17 orang PNS, 1 orang CPNS, dan 11 orang PPPK) dan 4 orang PJLP. ASN di BKIPM Balikpapan terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 12 pegawai fungsional umum, 9 pegawai fungsional inspektur mutu, 2 pegawai fungsional arsiparis, 3 pegawai fungsional keuangan dan 1 pegawai fungsional BMN. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Balikpapan



1.3. STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai KIPM Balikpapan dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai di ekspor ke negara tujuan.

Penjaminan keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan dari sektor produksi primer dan sektor produksi pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI dan pemenuhan standar produk sesuai persyaratan negara tujuan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi.



Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawsan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta melakukan inovasi guna peningkatan kinerja dan mengevaluasi pelayanan kinerja melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasiserta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan visi dan misinya yaitu :

Visi : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi:

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh, pengujian dan monitoring
- Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kebutuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan
- 3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional
- 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Balai KIPM Balikpapan sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2025-2029, yaitu:

 Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peringkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap



Perekonomian Nasional;

- 2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Balikpapan sebagai UPT BKIPM turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

- Meningkatnya konstribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
- Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
- 3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
- 4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yangl pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan tahun 2025 ditunjukan pada Gambar 2. dan Tabel 2. dibawah ini.



PETA STRATEGIS BKIPM BALIKPAPAN TAHUN 2025

SK. 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan perikanan SK. 2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar SK. 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Gambar 2. Peta Strategis BKIPM Balikpapan Tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III
IKK. 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	70
IKK. 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	70
IKK. 3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan	%	99	99
IKK. 4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	75	-



Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III
IKK. 5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	75	-
IKK. 6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	92	-
IKK. 7	Nilai Kinerja Perencaan Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	71.5	-
IKK. 8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	100	-
IKK. 9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan	Indeks	87	-
IKK. 10	Penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	86	-
IKK. 11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	85	85
IKK. 12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	76	76
IKK. 13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	70	-
IKK. 14	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	88	88

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan BKIPM Balikpapan Triwulan III
Tahun 2025



2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

- 1. Angka maksimum adalah 120;
- 2. Angka minimum adalah 0;
- 3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :
 - a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

Indeks Capaian IKU = Realisasi/Target x 100%

b. Polarisasi Minimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yanglebih kecil dari target, dengan formula :

Indeks Capaian IKU = {1 + (1 - Realisasi/Target)} x 100%

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH	HITAM
110 - 120	90 - < 110	70 - < 90	50 - < 70	< 50
Istimewa	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang

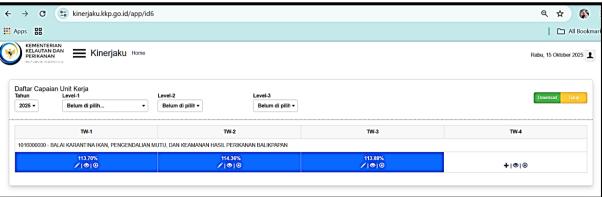


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Secara umum target kinerja Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan III tahun 2025 telah tercapai, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Organisasi (NKO) sebesar 113.88% dengan kategori istimewa, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di https://kinerjaku.kkp.go.id





Gambar Dasboard Capaian IK dan IKU pada Sistem Aplikasi Kinerjaku

Nilai capaian kinerja merupakan gambaran nilai kinerja Balai KIPM Balikpapan secara keseluruhan. Nilai capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 sebesar 113,88 %, capaian ini lebih rendah dari capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III tahun 2024 yaitu sebesar 116,17 %. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pada parameter indikator kinerja yang dilakukan pada Triwulan III Tahun 2024.

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Balikpapan Triwulan III tahun 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 3.

			Tahun 2025				
Kode	Indikator Kinerja Kegiatan Satuan		Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	%		
	SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif						
IKK. 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	100	120		
IKK. 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	%	70	120	120		
IKK. 3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan	%	99	100	101.01		
	erselenggaranya Pengendalian dan Penga erikanan Secara Professional dan Partisipatif		stem Mutu c	lan Keamana	n Hasil		
IKK. 4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-		
IKK. 5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-		
SK. 3. Tat	SK. 3. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Lingkup BPPMHKP						
IKK. 6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-		
IKK. 7	Nilai Kinerja Perencaan Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-		



			Tahun 2025			
Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	%	
IKK. 8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	-	-	-	
IKK. 9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan	Indeks	-	-	-	
IKK. 10	Penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	-	-	-	
IKK. 11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	85	100	117.65	
IKK. 12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	76	100	120	
IKK. 13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup BKIPM Balikpapan	Persen	50	-	-	
IKK. 14	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup BKIPM Balikpapan	Nilai	88	92.06	104.61	

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan III Tahun 2025

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasasan kegiatan secara lebih detil berdasarkan indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Balai KIPM Balikapapan, adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun



2025. Nilai capaian kegiatan Balai KIPM Balikpapan untuk sasaran kegiatan 1 pada Triwulan III tahun 2025 tersebut adalah 113,67 %.

Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

- 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan.
- 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan.
- 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan.

		Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029	
Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Triwulan III	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	(%)	Target	(%)
SK 1. T	erselenggaranya Pengendalian c	lan Pengawa	san Mutu F	łasil Kelaut	an Perika	ınan	
IKK. 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	-	70	100	120	70	120
IKK. 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan	-	70	120	120	70	120
IKK. 3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan	-	99	100	101.01	99	101.01

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan



IKK. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan

Dalam mendukung kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir, maka dilakukan sertifikasi terhadap produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer budidaya meliputi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) dan dari perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di kapal.

Sektor produksi perikanan primer merujuk pada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi sektor produksi primer dilakukan berdasarkan permohonan yang masuk pada sistem OSS maupun secara manual. Selama Triwulan III tahun 2025, terdapat 2 jenis sertifikasi sektor produksi primer yaitu Sertifikasi CPIB pada unit pembenihan ikan dan Sertifikasi CBIB pada pembudidaya ikan.











Gambar 4. Kegiatan Inspeksi CPIB di Unit Pembenihan Ikan dan CBIB di Pembudidayaan Ikan

Capaian indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan terhitung dari jumlah sertifikat yang diterbitkan (CPIB, CBIB, CPPIB, CPOIB dan CDOIB) dibagi dengan jumlah jenis sertifikasi. Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat realisasi CPIB sebanyak 4 sertifikat atau sebesar 100 % dan realisasi CBIB sebanyak 9 sertifikat atau sebesar 100 %. Berdasarkan data persentase sertifikasi CPIB dan sertifikasi CBIB tersebut maka capaian untuk IKU persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar 100 % dari target sebesar 70 %.



IKK. 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BKIPM Balikpapan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi : sertifikasi PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar serta kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan diterapkan melalui pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

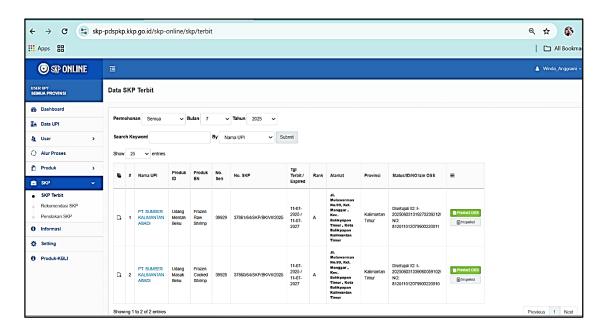
Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Internasional (Codex Alimentarius), dan standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.





Gambar 5. Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan



Gambar 6. Sertifikasi SKM di Unit Pengolahan Ikan melalui pemenuhan dokumen pendukung dan inspeksi online pada Website SKP Online



Capaian indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan perhitungannya berdasarkan persentase jumlah UPI yang menerapkan HACCP dan Program Kelayakan Dasar (GMP-SSOP) dengan jumlah parameter yang dinilai. Pada Triwulan III Tahun 2025, capaian kegiatan persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 120 % dari target sebesar 70 %.

IKK. 4. Rasio Ekspor Ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BKIPM Balikpapan

Sertifikat Mutu dan Keamanan hasil Perikanan (SMKHP) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

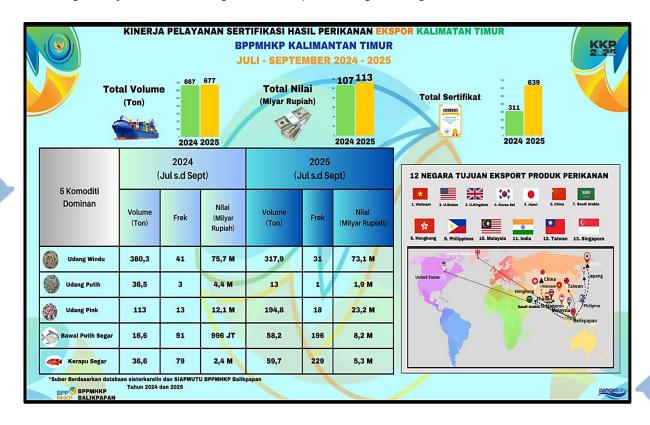
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah SMKHP yang terbit) dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada kasus penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Indikator rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor diukur dari jumlah SMKHP yang diterbitkan oleh BKIPM Balikpapan dibagi dengan jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan dengan melampirkan notifikasi penolakan kasus / penolakan SMKHP. Realisasi indikator kinerja rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor pada periode Triwulan III tahun 2025 sebesar 100 % dengan persentase 101.01 % dari target yang ditetapkan pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 99 %.

Tercapainya realisasi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh



negara tujuan ekspor merupakan komitmen bersama antara Balai KIPM Balikpapan dan stakeholder dalam rangka memenuhi jaminan mutu dan melengkapi persyaratan ekspor dari negara tujuan sesuai dengan amanat perundang-undangan.



Gambar 7. Perbandingan Ekspor Lima Komoditi Dominan Selama Triwulan III Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten dan Sesuai Standar

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2025. Sasaran kegiatan 2 lingkup BKIPM Balikpapan Triwulan III tahun 2025 belum memiliki nilai capaian karena capaiannya dilakukan secara tahunan.



Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten dan sesuai standar yaitu :

- 1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan.
- Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan

			Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029		
Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Triwulan III	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	(%)	Target	(%)	
	SK 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar							
IKK. 4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	70		
IKK. 5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	70	-	

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK. 4. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup BKIPM Balikpapan

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 : 2017 serta dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal



(akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Perhitungan capaian indicator kinerja nilai kualitas sistem manjemen mutu laboratorium lingkup BKIPM Balikpapan Tahun 2025 dilakukan secara tahunan.

IKK. 5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup BKIPM Balikpapan

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap Lembaga inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 : 2012 dan dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai kualitas sistem manjemen mutu Lembaga inspeksi lingkup BKIPM Balikpapan Tahun 2025 dilakukan secara tahunan.

Sasaran Kegiatan 3 : Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Balikpapan tahun 2025. Nilai capaian sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan III tahun 2025 tersebut adalah 115,05 %.



Indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian pada Triwulan III untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah :

- 1. Pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan
- 2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan
- 3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Balikpapan
- 4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan
- 5. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup BKIPM Balikpapan
- 6. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup BKIPM Balikpapan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029	
		Realisasi Triwulan III	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	(%)	Target	(%)
SK. 3. Tata	SK. 3. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Lingkup BKIPM Balikpapan						
IKK. 6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	92	-
IKK. 7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-		71.5	,
IKK. 8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	100	-
IKK. 9	Indeks Professional ASN lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	87	-
IKK. 10	Penilaian mandiri SAKIP lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	86	-



	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029	
Kode		Realisasi Triwulan III	Target Triwulan III	Realisasi Triwulan III	(%)	Target	(%)
SK. 3. Tata	SK. 3. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Lingkup BKIPM Balikpapan						
IKK. 12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan	-	76	100	120	76	120
IKK. 13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup BKIPM Balikpapan	-	-	-	-	70	-
IKK. 14	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BKIPM Balikpapan	99.55	88	92.06	104.61	88	104.61

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK. 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Balikpapan

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output satker didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Pencapaian nilai IKPA berdasarkan ketaatan pada 8 indikator yaitu revisi DIPA, Deviasi RPD, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian output.

- 1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
- 2. Deviasi RPD, merujuk pada perbedaan antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi penarikan dana yang sebenarnya.
- 3. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
- 4. Belanja kontraktual, digunakan sebagai tolak ukur dalam ketepatan waktu penyampaian



data kontrak dan upaya akselerasi belanja kontraktual. Perhitungannya berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja komponen ketepatan waktu (bobot 40 %), akselerasi kontrak dini (bobot 30 %) dan akselerasi belanja modal (bobot 30 %)

- 5. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
- 6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkalikali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor.
- 7. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
- 8. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran.

Capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Balikpapan tahun 2025 dilakukan per semester sehingga pada Triwulan III tidak memiliki nilai capaian.

IKK. 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BKIPM Balikpapan

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian / Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek



manfaat dengan bobot masing-masing.

Target yang ditetapkan untuk nilai kinerja anggaran tahun 2025 adalah Cukup (71.50) sedangkan pengukuran capaiannya dilakukan tahunan pada aplikasi Online Monitoring SMART DJA.

IKK. 8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BKIPM Balikpapan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian / lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu :

SKALA	OPINI
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar Dengan Pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Keterangan : Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya

Perhitungan capaian indikator persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025 dilakukan per tahun sehingga pada Triwulan III Tahun 2025 belum memiliki mai capaian.



IKK. 9. Indeks Profesional ASN Lingkup BKIPM Balikpapan

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Perhitungan capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Balikpapan tahun 2025 dilakukan setiap semester sehingga pada Triwulan III Tahun 2025 tidak memiliki nilai capaian.

IKK. 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BKIPM Balikpapan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kiierja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kepatuhan : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada



ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ / LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ / LCK TW III

- 2. Aspek kesesuaian : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
- 3. Aspek ketercapaian : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata- rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku

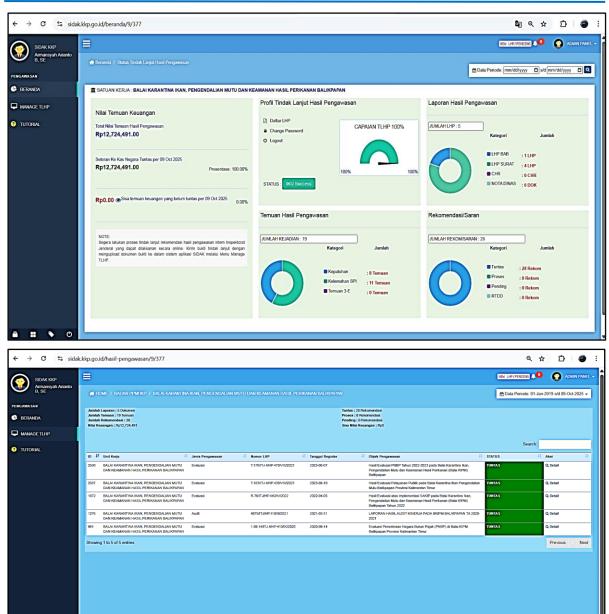
Perhitungan capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025 dilakukan secara tahunan sehingga pada Triwulan III Tahun 2025 tidak memiliki nilai capaian.

IKK. 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Balikpapan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Balai KIPM Balikpapan yang sudah ditindaklanjuti (proses dan / atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target komulatif tahunan sebesar 85 % pada tahun 2025.

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Balikpapan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Balai KIPM Balikpapan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2024 s/d Triwulan II Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Satker yang menjadi objek pengawasan. Pengecualian apabila tidak terdapat temuan dari Inspektorat Jenderal Mitra, maka capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Level II sesuai dengan *capture dashboard* pada Aplikasi SIDAK.





Gambar 8. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan III Tahun 2025

Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai KIPM Balikpapan pada periode Triwulan III tahun 2025 adalah 100 % dari target sebesar 85 %, yang diperoleh dari *capture dashboard* pada Aplikasi SIDAK KRP.



IKK. 12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BKIPM Balikpapan

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Target yang ditetapkan untuk capaian indikator kinerja persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BKIPM Balikpapan adalah 76 % sedangkan pengukuran capaiannya dilakukan setiap triwulan. Capaian indikator ini pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 100 % berdasarkan penyampaian Nota Dinas dari Sekretariat Jendral KKP Nomor 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tanggal 08 Oktober 2025

IKK. 13. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup BKIPM Balikpapan

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.



Nilai pembangunan integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona integritas (bobot 30 %)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15 %)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15 %)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15 %)
- e. Pelaporan harta kekayaan (LHKAN) (bobot 15 %)
- f. Pengendalian kecurangan (bobot 10%)

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona itegritas lingkup Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025 dilakukan per semester sehingga pada Triwulan III tidak memiliki nilai capaian.

IKK. 14. Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Lingkup BKIPM Balikpapan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat / pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari UPT lingkup BKIPM.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "Nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap



9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang =
$$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM	-	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur	Y Nilai Penimbang Total
IIXIVI	_	Unsur Yang Terisi	A Milai Feminibang Total

Untuk memudahkan interpretasi penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut

SKM Unit Pelayanan x 25

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	В	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 -100,00	А	Sangat Baik

Tabel 7. Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 92.06 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena masih berada dalam Nilai Perepsi, Nilai Interval, Nilai Internal konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja



Unit Pelayanan 88.31 - 100.00. Capaian Indikator Kinerja nilai kepuasan masyarakat terhadap proses layanan dari Balai KIPM Balikpapan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebesar 92.06 atau dengan persentase sebesar 104.61 % dari target yang ditetapkan yaitu 88. Dibandingkan capaian Triwulan III tahun 2024 dengan nilai 99.55, capaian indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik lingkup BKIPM Balikpapan periode Triwulan III tahun 2025 memiliki capaian yang lebih menurun.

No.	Unsur SKM	Nilai Rata-rata
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3.73
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3.66
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan	3.71
4	Kesesuaian biaya jasa pelayanan	3.68
5	Kesesuaian produk pelayanan	3.71
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh / unggah) dari aplikasi sistem pelayanan	3.63
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan	3.63
8	Kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan	3.73
9	Layanan konsultasi dan pengaduan	3.68
	Konversi Nilai SKM	92.06
	Kategori Mutu Pelayanan	Α
	Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik

Tabel 8. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Dari hasil analisa hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat diketahui bahwa :

- a. Tiga unsur layanan terendah dari parameter kompetensi pelayanan sebesar 3.63, parameter perilaku pelaksana sebesar 3.63 dan parameter sistem, mekanisme dan prosedur sebesar 3.66
- b. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi dari parameter persyaratan sebesar 3.73, parameter penanganan, pengaduan, saran dan masukan sebesar 3.73 dan parameter



waktu penyelesaian sebesar 3.71

Adapun kondisi permasalahan dari ketiga unsur layanan yang mendapatkan nilai terendah ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Kompetensi pelayanan perlu lebih ditingkatkan kembali dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait pelayanan publik
- b. Sistem dan mekanisme serta prosedur pelayanan pada Balai KIPM Balikpapan yang telah berubah sesuai dengan Permen KP Nomor 16 Tahun 2024, perlu lebih disosialisasikan kembali kepada pengguna layanan
- c. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan layanan perlu lebih dioptimalkan

Rencana tindak lanjut untuk unsur yang memiliki capaian nilai terendah dilakukan melalui :

- a. Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan waktu layanan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, dan kendala pada aplikasi SIAP MUTU) serta melakukan refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan
- b. Publikasi prosedur layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dll) dan media elektronik (media social, whatsapp) serta sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan
- c. Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna layanan terkait penggunaan Aplikasi SIAP MUTU dan OSS serta melakukan asistensi penggunaan aplikasinya.

Kualitas kinerja pelayanan perlu terus ditingkatkan terutama unsur pelayanan yang memperoleh nilai lebih rendah, agar nilai SKM yang diperoleh dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan / stakeholder.



LAPORAN KINERJA BKIPM BALIKPAPAN TRIWULAN IIII - TAHUN 2025

	Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025													
NO	UPP				NILAI PEF	R-UNSUR	LAYANAN				NILAI	MUTU	KINERJA	JUMLAH
140	GFF	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	SKM	PELAYANAN	PELAYANAN	RESPONDEN
1	Stasiun KIPM Bandung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	A	Sangat Baik	10
2	Stasiun KIPM Merauke	99,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,04	100,00	100,00	99,79	Α	Sangat Baik	26
3	Stasiun KIPM Merak	99,23	100,00	100,00	99,48	99,74	99,74	99,74	100,00	100,00	99,77	A	Sangat Baik	97
4	Stasiun KIPM Palu	100,00	100,00	100,00	98,89	100,00	99,44	98,89	100,00	100,00	99,69	A	Sangat Baik	45
5	Balai KIPM Banjarmasin	99,87	99,62	99,62	99,62	99,49	99,11	99,75	99,75	99,87	99,63	A	Sangat Baik	197
6	Stasiun KIPM Pekanbaru	99,68	99,52	99,36	99,36	99,52	99,36	99,36	99,52	99,52	99,47	A	Sangat Baik	314
7	Balai KIPM Entikong	99,58	99,17	99,17	99,58	99,17	99,58	99,17	99,58	98,33	99,26	A	Sangat Baik	60
8	Stasiun KIPM Gorontalo	98,94	99,47	99,47	99,47	99,47	98,94	98,94	99,47	98,94	99,23	А	Sangat Baik	47
9	Stasiun KIPM Pontianak	99,64	99,29	99,64	99,29	99,64	97,86	96,79	97,50	97,86	98,61	А	Sangat Baik	70
10	Balai KIPM Tarakan	99,21	99,21	98,81	98,41	97,62	97,22	98,41	98,81	98,81	98,50	A	Sangat Baik	63
11	Stasiun KIPM Ternate	98,39	97,98	97,98	98,79	98,79	99,19	98,39	98,39	97,58	98,39	A	Sangat Baik	62
12	Stasiun KIPM Aceh	96,43	98,21	98,21	100,00	98,21	98,21	96,43	98,21	98,21	98,02	A	Sangat Baik	14
13	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	97,87	97,34	97,87	97,34	97,87	96,81	97,34	97,34	97,34	97,46	A	Sangat Baik	47
14	Stasiun KIPM Tahuna	96,43	96,43	92,86	96,43	100,00	100,00	100,00	96,43	96,43	97,22	Α	Sangat Baik	7
15	Stasiun KIPM Sorong	97,22	97,57	97,92	95,14	97,22	97,57	97,57	97,22	96,88	97,15	A	Sangat Baik	72
는														
16	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	97,79	97,06	96,32	97,79	96,32	96,32	97,06	97,79	97,06	97,06	Α	Sangat Baik	34
17	Balai KIPM Medan I	97,56	97,56	97,56	98,17	96,95	97,56	97,56	98,17	92,07	97,02	A	Sangat Baik	41
18	Balai Besar KIPM Makassar	97,12	96,86	96,78	96,63	96,93	96,82	96,78	96,97	96,82	96,86	A	Sangat Baik	660
19	Stasiun KIPM Batam	97,41	97,41	98,28	97,41	97,41	95,69	94,83	97,41	94,83	96,74	A	Sangat Baik	29
20	Stasiun KIPM Padang	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	94,44	94,44	100,00	94,44	96,60	A	Sangat Baik	9
21	Stasiun KIPM Kendari	99,29	96,43	96,43	95,71	96,43	95,00	96,43	95,71	96,43	96,43	A	Sangat Baik	35
22	Balai KIPM Ambon	95,83	97,50	95,83	96,25	96,25	95,83	95,83	96,67	95,83	96,20	Α	Sangat Baik	60
23	Balai KIPM Mataram	96,88	96,31	96,02	95,17	96,02	95,45	95,45	96,02	96,88	96,02	A	Sangat Baik	88
24	Stasiun KIPM Bima	97,02	96,43	95,24	95,24	95,83	95,83	97,62	95,83	94,05	95,90	A	Sangat Baik	42
25	Stasiun KIPM Medan II	95,74	96,28	93,62	97,34	95,21	95,74	96,28	96,81	95,74	95,86	A	Sangat Baik	47
26	Balai KIPM Surabaya II	97,73	97,93	96,49	97,73	97,31	97,31	97,73	97,73	79,34	95,48	A	Sangat Baik	121
27	Stasiun KIPM Palangkaraya	95,24	94,64	95,24	96,43	95,24	95,24	94,64	95,83	94,64	95,24	A	Sangat Baik	42
28	Stasiun KIPM Cirebon	96,70	95,60	95,33	96,15	95,05	93,41	93,41	94,78	93,96	94,93	A	Sangat Baik	91
29	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	100,00	93,75	94,44	A	Sangat Baik	24
30	Balai KIPM Tanjung Pinang	94,50	92,82	94,31	94,68	93,00	91,88	91,70	94,50	93,75	93,46	A	Sangat Baik	268
31	Stasiun KIPM Palembang	84,97	97,98	85,48	97,60	97,85	85,10	96,97	97,47	97,47	93,43	A	Sangat Baik	198
32	Balai KIPM Jakarta II	93,85	93,44	93,44	94,67	92,62	94,67	92,21	92,62	93,03	93,40	А	Sangat Baik	61
33	Stasiun KIPM Mamuju	96,88	87,50	96,88	90,63	93,75	96,88	90,63	90,63	93,75	93,06	A	Sangat Baik	8



$\overline{}$														
34	Pusat Manajemen Mutu	93,10	92,24	91,38	96,55	93,10	91,38	93,10	92,24	93,10	92,91	А	Sangat Baik	29
35	Stasiun KIPM Kupang	92,59	93,10	93,79	92,07	92,76	92,59	92,76	92,59	92,93	92,80	А	Sangat Baik	145
36	Stasiun KIPM Bau-Bau	92,11	92,76	92,76	93,42	91,45	92,76	93,42	92,76	92,76	92,69	А	Sangat Baik	38
37	Stasiun KIPM Yogyakarta	97,06	94,85	92,65	89,71	92,65	91,91	90,44	94,12	90,44	92,65	А	Sangat Baik	34
38	Balai Besar KIPM Jakarta I	95,61	93,24	92,23	93,92	92,23	90,88	91,22	93,24	90,54	92,57	Α	Sangat Baik	74
39	Balai KIPM Manado	92,65	92,65	93,38	92,65	93,38	90,44	91,91	92,65	93,38	92,57	Α	Sangat Baik	34
40	Stasiun KIPM Bengkulu	94,44	91,67	89,81	92,59	92,59	89,81	93,52	96,30	91,67	92,49	Α	Sangat Baik	27
41	Balai KIPM Semarang	93,21	91,79	92,86	93,93	93,21	89,29	91,79	93,21	92,14	92,38	А	Sangat Baik	70
42	Balai KIPM Balikpapan	93,29	91,46	92,84	91,92	92,68	90,70	90,55	93,14	91,92	92,06	Α	Sangat Baik	164
43	Stasiun KIPM Jambi	93,75	84,38	93,75	91,67	97,92	85,42	89,58	93,75	91,67	91,32	А	Sangat Baik	24
44	Balai KIPM Jayapura	92,59	88,89	90,74	91,67	91,67	90,74	87,04	90,74	92,59	90,74	А	Sangat Baik	27
45	Balai KIPM Lampung	91,43	92,14	88,57	91,43	90,00	90,00	90,71	91,43	90,00	90,63	А	Sangat Baik	35
46	Balai UJi Standar KIPM	93,55	91,94	91,13	91,13	88,71	88,71	89,52	91,13	89,52	90,59	Α	Sangat Baik	31
47	Balai KIPM Denpasar	90,05	89,81	90,51	89,81	90,05	90,51	89,35	91,44	91,44	90,33	Α	Sangat Baik	108
48	Balai KIPM Surabaya I	91,35	90,09	90,09	91,35	91,04	87,74	88,21	90,57	89,94	90,04	А	Sangat Baik	159

Gambar 9. Penyampaian hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Balikpapan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 6.315.049.000,- serta pemblokiran anggaran sebesar Rp. 1.341.238.000,- sehingga alokasi anggaran yang bisa digunakan setelah blokir adalah Rp. 4.973.811.000,- Penyerapan anggaran Balai KIPM Balikpapan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 adalah Rp. 3.292.274,561,- atau sebesar 52.13 % dari pagu anggaran yang tersedia.

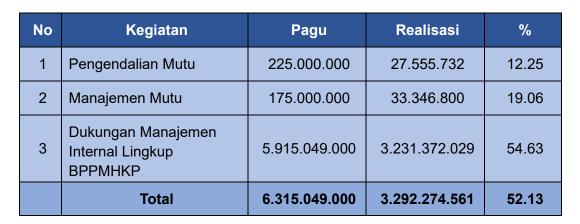
Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,36 %, dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Triwulan III tahun 2025 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan dapat dilihat pada Tabel 9. dan Tabel 10 dan Gambar 12.



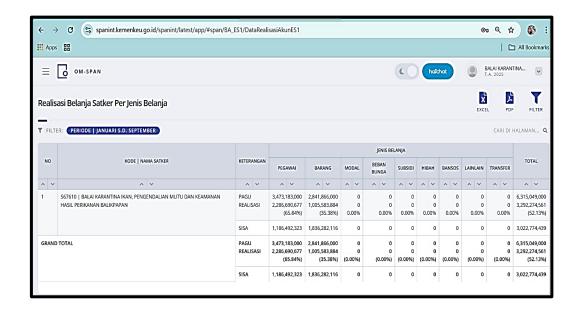
No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3.473.183.000	2.286.690.677	65.84
2	Belanja Barang	2.841.866.000	1.005.583.884	35.38
3	Belanja Modal	0	0	0
	Total	6.315.049.000	3.292.274.561	52.13

Tabel 9. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2025



Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan III Tahun 2025





Gambar 10. Tangkap Layar Realisasi Anggaran BKIPM Balikpapan Sampai Dengan Triwulan III 2025 Pada Website spanint.kemenkeu.go.id

3.4. EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Balai KIPM Balikpapan telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisensi pelaksanaan tugas.. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Balai KIPM Balikpapan untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas kinerja.



Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada Triwulan III tahun 2025, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai dengan adanya dukungan Anggaran DIPA BKIPM Balikpapan Tahun 2025.
- 2. Sebanyak 6 (enam) kegiatan yang merupakan target pada Triwulan III memiliki capaian melebihi target.
- 3. Capaian realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan OMSPAN adalah Rp. 3.292.274.561,- atau sebesar 52.13 % dari pagu anggaran Rp. 6.315.049.000,-.



BAB. IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Balikpapan Triwulan III tahun 2025 menyajikan capaian sasaran strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025. Capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya dan juga target Renstra 2025 - 2029 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BKIPM Balikpapan Triwulan III tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

- Nilai capaian indikator kinerja Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 113,88 % yang dapat dilihat pada aplikasi kinerjaku di https://kinerjaku.kkp.go.id/
- Pencapaian kinerja Balai KIPM Balikpapan periode Triwulan III tahun 2025 sangat baik dengan diperolehnya Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,88 % pada aplikasi kinerjaku.
- 3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III tahun 2025, sebanyak 6 indikator kinerja capaiannya telah melebihi target.
- 4. Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan III tahun 2025 mencapai Rp. 3.292.274,561,- atau sebesar 52.13 % dari pagu anggaran Rp. 6.315.049.000,-.
- 5. Untuk meningkatkan nilai efisiensi pada triwulan berikutnya maka Balai KIPM Balikpapan perlu melakukan optimalisasi dan efisiensi sumberdaya dengan memaksimalkan sumberdaya manusia, waktu kerja dan anggaran kegiatan.



4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Balai KIPM Balikpapan pada Triwulan III tahun 2025 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi triwulan sebelumnya sebagai dasar pemenuhan target triwulan berikutnya. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan pemenuhan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
- 2. Melakukan perbaikan / tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
- 3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik dan terstruktur agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
- Laporan pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar perencanaan kinerja triwulan berikutnya, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja berorientasi hasil yang lebih optimal.



LAMPIRAN

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PRIMER

YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP UPT

BKIPM BALIKPAPAN

NAMA TIMJA : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI PRIMER

PERIODE LAPORAN : TRIWULAN III / 2025

Nama Sasara Kegiatan					Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan								
Nama Indikat Kinerja		Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan											
			ī	ahun 20	25			Capaian Target					
T/R	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan	Tahun 2025	Tahun 2025				
Target	70%	70%	70%	70%					70 %				
Realisasi	100%	80%	80%	100%									
% Capaian	120%	114%	114%	120%									

Catatan:

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4

SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2 SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4 Tahunan : Capaian di akhir tahun 2025

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Pusat pengendalian dan pengawasan mutu produk primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produk sumber daya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan. Sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan, yang pada gilirannya melahirkan tuntutan terhadap jaminan keamanan, mutu dan kesehatan bahan makanan yang dikonsumsi termasuk komoditas kelautan dan perikanan. Untuk menjawab tantangan pasar Internasional berupa persyaratan mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan yang semakin berkembang, baik dalam metodologi serta berkembangnya nilai tambah. Dengan demikian sebagai negara produsen hasil kelautan dan perikanan kesigapan untuk mampu menanggulangi bahkan mengantisipasi hambatan dalam kegiatan ekspor hasil perikanan Indonesia yang mampu memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sejak proses produksi, pengolahan, sampai distribusi.

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Perubahan organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan yang semula dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan, sehingga diperlukan sosialisasi terhadap stakeholder pada organisasi baru. Di negara berkembang masalah keamanan pangan

banyak disebabkan oleh kurangnya praktik sanitasi yang baik serta kurangnya kesadaran terhadap pentingnya sanitasi.

- Sarana dan Prasarana
 Sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pada BPPMHKP kurang memadai
- Anggaran pelaksanaan kegiatan
 Efisiensi pemanfaan anggaran berimbas pada tugas dan fungsi yang diampu

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

- 1. Capaian indikator diperoleh dengan menghitung persentase pelaksanaan sertifikasi CPIB ditambah dengan persentase pelaksanaan sertifikasi CBIB, dibagi dengan jumlah dari unsur pembentuk (2) dikali 100 %
- 2. Capaian indikator dihitung setiap triwulan
- 3. Realisasi terhadap IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup BKIPM Balikpapan sebesar 100 % berdasarkan data sebagai berikut :
 - Sertifikasi CPIB (A)
 - a. Permohan sertifikasi CPIB di pembudidaya ikan sebanyak 4 produk
 - b. Realisasi sertifikasi CPIB di pembudidaya ikan sebanyak 4 produk atau sebesar 100 %
 - Sertifikasi CBIB di Unit Pembenihan Ikan (B)
 - a. Permohonan sertifikasi CBIB di unit pembenihan ikan sebanyak 9 produk
 - b. Realisasi sertifikasi CBIB sebanyak 9 produk atau sebesar 100 %
 - Berdasarkan data persentase sertifikasi CPIB dan sertifikasi CBIB tersebut maka capaian untuk IKU persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebesar 100 %.

% X =
$$\frac{A + B}{xn}$$

= $\frac{100 + 100}{2}$
= 100

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

1. Melaksanakan Sertifikasi CPIB di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.









2. Melaksanakan Sertifikasi CBIB di Kota Balikpapan.









Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan / diklat.	Timja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Primer
2. Mengadakan sosialisasi tentang tugas dan fungsi yg terkait dengan pusat pengendalian dan pengawasan sektor produksi primer terutama pada layanan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) dan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal	

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab		
Mengikuti pelatihan sistem jaminan mutu untuk peningkatan	Timja Pengendalian dan Pengawasan		
kompetensi inspektur mutu	Produksi Primer		



HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PRIMER YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan Periode / Tahun : Triwulan III / 2025

No	Jenis Sertifikasi	Nama Pemilik	Alamat	NIB	PB-UMKU	No. Referensi Teknis	Ruang Lingkup	Tanggal Sertifikat
1.	CBIB	ABD Azis	Sunge Batum Kel. Sunge Batu Kec. Paser Balengkong, Kab. Paser	2709220057397	270922005739700030001	ID-CBIB-T-64-250014	Ikan Bandeng	28 Februari 2025
2	CBIB	Muhammad Ali	Pesayan, Kel Pesayan Kec. Sambaliung Kab. Berau Kalimantan Timur	3001250004537	300125000453700000001	ID-CBIB-T-64-250068	Udang Windu	25 Juni 2025
3	CBIB	Bunyamin	Sijaran, Kel. suaran Kec. Sambaliung Kab. Berau	2401250004443	240125000444300010001	ID-CBIB-T-64-250069	Udang Windu	25 Juni 2025
4	CBIB	Unjuk	Sunge Batu, Kel Singe Batu, Kec. Paser Balengkong, Kab. Paser	0604230038058	060423003805800010001	ID-CBIB-T-64-250070	Udang Windu	25 Juni 2025
5	CBIB	Unjuk	Sunge Batu, Kel Singe Batu, Kec. Paser Balengkong, Kab. Paser	0604230038058	060423003805800010001	ID-CBIB-T-64-250071	CBIB Ikan Bandeng	25 Juni 2025
6	СВІВ	Baharuddin	Sunge Batu, Kel Singe Batu, Kec. Paser Balengkong, Kab. Paser	0604230025436	060423002543600010001	ID-CBIB-T-64-250073	CBIB Ikan Bandeng	25 Juni 2025
7	СВІВ	Rusli	Suaran, Kel. Suaran, Kec. Sambaliung Kab. Berau	2401250013871	240125001387100010001	ID-CBIB-T-64-250067	Udang Windu	25 Juni 2025
8	CBIB	Baharuddin	Sunge Batu, Kel Singe Batu, Kec. Paser Balengkong, Kab. Paser	0604230025436	060423002543600020001	ID-CBIB-T-64-250072	Udang Windu	25 Juni 2025
9	CBIB	Lahuddin	Suaran, Kel. Suaran, Kec. Sambaliung Kab. Berau	3001250002232	300125000223200000001	ID-CBIB-T-64-250078	Udang Windu	30 Juni 2025
10	CBIB	Fajar Lestari	Suaran, Kel. Suaran, Kec. Sambaliung Kab. Berau	1601250024266	160125002426600020002	ID-CBIB-T-64-250079	Udang Windu	30 Juni 2025

No.	Jenis Sertifikasi	Nama Pemilik	Alamat	NIB	PB-UMKU	No. Referensi Teknis	Ruang Lingkup	Tanggal Sertifikat
11	CBIB	Raup	Sunge Batu, Kel.Sunge Batu,Kec. Paser Balengkong. Kab Paser	1304230012516	130423001251600020001	ID-CBIB-T-64-250082	Udang Windu	30 Juni 2025
12	CBIB	Ruslan	Suaran, Kel. Suaran, Kec. Sambaliung Kab. Berau	1601250031519	160125003151900020001	ID-CBIB-T-64-250083	Udang Windu	30 Juni 2025
13	CBIB	Hasanuddin	Suaran, Kel. Suaran, Kec. Sambaliung Kab. Berau	1001240031837	100124003183700020001	ID-CBIB-T-64-250084	CBIB Ikan Bandeng	30 Juni 2025
14	CBIB	Hasanuddin	Suaran, Kel. Suaran, Kec. Sambaliung Kab. Berau Kalimantan Timur	1001240031837	100124003183700020001	ID-CBIB-T-64-250085	Udang Windu	30 Juni 2025
15	CBIB	Sahri	Jone GG Amasm Kel. Jone, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser	2311230025387	231123002538700030001	ID-CBIB-T-64-250086	Udang Windu	30 Juni 2025
16	CBIB	Burhanuddin	Sunge Batu, Kel Sunge Batu, Kec. Paser Balengkong, Kab. Paser	1304230014428	130423001442800020001	ID-CBIB-T-64-250087	Udang Windu	30 Juni 2025
17	CBIB	Burhanuddin	Sunge Batu, Kel Sunge Batu, Kec. Paser Balengkong, Kab. Paser	1304230014428	130423001442800020001	ID-CBIB-T-64-250088	CBIB Ikan Bandeng	30 Juni 2025
18	CBIB	Abu Talib	Sunge Batu, Kel Singe Batu, Kec. Paser Balengkong, Kab. Paser	0604230029995	060423002999500010001	ID-CBIB-T-64-250090	CBIB Ikan Bandeng	30 Juni 2025
19	CBIB	Abu Talib	Sunge Batu, Kel Singe Batu, Kec. Paser Balengkong, Kab. Paser	0604230029995	060423002999500010001	ID-CBIB-T-64-250089	Udang Windu	30 Juni 2025
20	CBIB	Andi Tenri	Sunge Batu, Kel Singe Batu, Kec. Paser Balengkong, Kab. Paser	1704230016743	170423001674300020001	ID-CBIB-T-64-250091	Udang Windu	30 Juni 2025
21	CBIB	Andi Tenri	Sunge Batu, Kel Singe Batu, Kec. Paser Balengkong, Kab. Paser	1704230016743	170423001674300020001	ID-CBIB-T-64-250092	CBIB Ikan Bandeng	30 Juni 2025

No	Jenis Sertifikasi	Nama Pemilik	Alamat	NIB	PB-UMKU	No. Referensi Teknis	Ruang Lingkup	Tanggal Sertifikat
22	CBIB	Syarifuddin	Kampung Suaran, Kel. Suaran, Kec Sambaliung, Kab. Berau	3001250002704	300125000270400010001	ID-CBIB-T-64-250081	Udang	02 Juli 2025
23	CBIB	Sesa Nasrul	Kampung Suaran, Kel. Suaran, Kec Sambaliung, Kab. Berau	3001250003479	300125000347900010001	ID-CBIB-T-64-250080	Udang	03 Juli 2025
24	CBIB	Raup	Sunge Batu, Kel.Sunge Batu, Kec. Paser Balengkong. Kab Paser	1304230012516	130423001251600020001	ID-CBIB-T-64-250107	Udang	07 Juli 2025
25	CBIB	Nanang	Muara Paser, Kel. Muara Pasir Kec. Tanah Grogot, Kab Paser	2311230015263	231123001526300020001	ID-CBIB-T-64-250108	Udang	07 Juli 2025
26	CBIB	Bunyamin	Sijaran, Kel. Suaran Kec. Sambaliung Kab. Berau	2401250004443	240125000444300000001	ID-CBIB-P-64-250228	Ikan Bandeng	08 Agustus 2025
27	CBIB	Budimin	JL. Handil marga RT. 33 Teritip, Desa/Kelurahan Teritip, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	9120204262762	912020426276200030001	ID-CBIB-T-64-250268	Ikan Lele	21 Agustus 2025
28	CBIB	Budimin	JL. Handil marga RT. 33 Teritip, Desa/Kelurahan Teritip, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	9120204262762	912020426276200020001	ID-CBIB-T-64-250269	Kepiting Soka	21 Agustus 2025
29	CBIB	Didik Supriyanto	Jl. Mulawarman Gang setia Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	1506220053236	150622005323600010001	ID-CBIB-T-64-250266	Ikan Lele	21 Agustus 2025
30	CBIB	Rusli	Jl. Mulawarman Gang Setia Kel. Tritip Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikppan	151120025961	151121002596100030001	ID-CBIB-T-64-250267	Ikan Lele	21 Agustus 2025

Balikpapan, 10 Oktober 2025

Balai Karantina iran
Pengendalian Mutu dali
Reamanan Hasil Perikkaan
Balikpapan

Bali

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PRIMER YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan Periode / Tahun : Triwulan III / 2025

No	. Jenis Sertifikasi	Nama Pemilik	Alamat	NIB	PB-UMKU	No. Referensi Teknis	Ruang Lingkup	Tanggal Sertifikat
1	CPIB	UPTD BBI Tanjung Laut Indah Kota Bontang	Jl, Pelabuhan RT.14 Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan	-	-	ID-CPIB-T-64-250023	Benih Lele	24 Maret 2025
2	СРІВ	UPTD BBI Tanjung Laut Indah Kota Bontang	Jl, Pelabuhan RT.14 Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan	-	-	ID-CPIB-T-64-250024	Benih Nila	24 Maret 2025
3	СРІВ	UPTD BBI Tanjung Laut Indah Kota Bontang	Jl, Pelabuhan RT.14 Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan	-	-	ID-CPIB-T-64-250025	Benih Gurame	24 Maret 2025
4	СРІВ	Wahyudi	Jl. Padat Karya RT 3 Desa / Kel. Sambutan, Kec. Sambutan Kota Samarinda	1107250012703	110725001270300010001	ID-CPIB-T-64-250090	Benih Ikan Nila	03 September 2025
5	СРІВ	Pudjo Noor Roso,S.PD	Jl, Pasundan No.24 Rt.01 Desa / Kel. Sendang Sari Kec. Sambutan Kota Samarinda	0236000912786	023800091278600010001	ID-CPIB-T-64-250089	Benih Ikan Nila	03 September 2025
6	СРІВ	Riza Indra Riadi	Jl, Sosial dalam Rt.19 No. 57 Desa/Kel. Lamaru, Kec Balikpapan Timur Kota Balikpapan	0201250035533	020125003553300010001	ID-CPIB-T-64-250088	Benih Udang Windu	03 September 2025
7	СРІВ	Farid Wajdi Rahim	Perum SBT Permai Blok GG No. 04 Desa / Kelurahan Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda	0408250063569	40825006356900010001	ID-CPIB-T-64-250103	Benih Ikan Nila	22 September 2025





LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PASCA

PANEN YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP

BKIPM BALIKPAPAN

NAMA TIMJA : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PASCA PANEN

PERIODE LAPORAN : TRIWULAN III / 2025

Nama Sasara Kegiatan	n	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan							
Nama Indikator :			Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup BKIPM Balikpapan							
T/D			Т	ahun 20	25			Capaian Target		
T/R	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan	Tahun 2025	Tahun 2025	
Target	70%	70%	70%	70%					70%	
Realisasi	110%	120%	120%	120%						
% Canaian	120%	120%	120%	120%						

Catatan:

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4

SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2 SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4 Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada :
 - 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 - 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

• Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah

Terdapat isu utama yaitu:

1. Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa Dan / Atau Hasil Perikanan menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Perubahan tentang semua hasil perikanan yang keluar dari wilayah Republik Indonesia baik untuk konsumsi maupun non konsumsi wajib disertai dengan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) sehingga pelaku usaha wajib memiliki Sertifikat HACCP sebagai salah satu persyaratan untuk pengiriman produk ke negara tujuan

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

- Capaian indikator diperoleh dengan menghitung persentase penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk ditambah dengan persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP SSOP, dibagi dengan jumlah dari unsur pembentuk (2) dikali 100 %
- 2. Capaian indikator dihitung setiap triwulan
- 3. Realisasi terhadap IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup BKIPM Balikpapan sebesar 110 % berdasarkan data sebagai berikut :
 - Sertifikasi HACCP di UPI (A)
 - a. Target penerapan HACCP di UPI sebanyak 2 produk
 - b. Realisasi penerapan HACCP di UPI sebanyak 5 produk atau sebesar 120 %
 - Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) di UPI (B)
 - a. Target sertifikasi SKP hasil kelautan dan perikanan di UPI skala UMKM dan menengah besar sebanyak 2 produk
 - b. Realisasi SKP yang diterbitkan sebanyak 10 produk atau sebesar 120 %
 - Berdasarkan data persentase sertifikasi HACCP dan sertifikasi SKP tersebut maka capaian untuk IKU
 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu
 dan keamanan pangan sampai dengan Triwulan III adalah sebesar 120 %

$$\% X = \frac{A + B}{xn}$$
= \frac{120 + 120}{2}
= 120

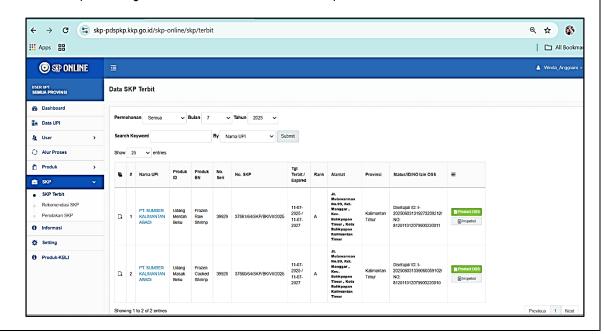
Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

1. Melakukan pengendalian penerapan jaminan mutu di Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui kegiatan inspeksi penerapan HACCP. Kegiatan inspeksi dilakukan pada Bulan Juli 2025 pada 2 UPI dengan 5 ruang lingkup produk.





2. Pelaksanaan sertifikasi pelaksanaan GMP dan SSOP di UPI dan UMKM melalui pemenuhan dokumendokumen pendukung melalui website SKP Online dan inspeksi secara online



Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Pengendalian pemenuhan persyaratan sertifikasi jaminan mutu di UPI sesuai dengan PP 28 Tahun 2025	Timja Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Mengikuti kegiatan pelatihan penjaminan mutu untuk peningkatan kompetensi inspektur mutu secara daring	Timja Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAH KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Balikpapan, 10 Oktober 2025

Eko Sulystianto

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PASCA PANEN YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan Periode / Tahun : Triwulan III / 2025

N	o. Jenis Sertifikasi	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk / Ruang Lingkup	Nomor Sertifikat	Tanggal Inspeksi	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	HACCP	PT. Nusaybah Alby Saing	Jl. 21 Januari RT. 47 Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur	В	Fresh Demersal Fish	276/PM/HACCP/PS/03/25	13 Maret 2025	19 Maret 2025 - 19 Maret 2027	Baru
	P HACCP	CV. Tiga A (Unit Manggar)	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan East Kalimantan - Indonesia	B B B	Live Crab Live Eel Live Lobster	054/PM/HACCP/PH/04/25 055/PM/HACCP/PH/04/25 056/PM/HACCP/PH/04/25	15 April 2025	22 April 2025 - 22 April 2027	Penambahan Ruang Lingkup
;	B HACCP	CV. Tiga A (Unit Manggar)	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan East Kalimantan - Indonesia	B B B	Live Grouper Live Shell Live Snail	061/PM/HACCP/PH/04/25 062/PM/HACCP/PH/04/25 063/PM/HACCP/PH/04/25	16 April 2025	22 April 2025 - 22 April 2027	Penambahan Ruang Lingkup
	HACCP	PT. Borneo Ocean Nauly	Jl. Tanjung Harapan, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, East Kalimantan - Indonesia	В	Dried Seaweed	233/PM/HACCP/PK/06/25	16 Juni 2025	27 Juni 2025 - 27 Juni 2027	Perpanjangan
	5 HACCP	CV. Tiga A (Unit Kampung Baru)	Jalan 21 Januari Kampung Baru, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, East Kalimantan - Indonesia	В В В	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Fish	033/PM/HACCP/PS/07/25 034/PM/HACCP/PS/07/25 035/PM/HACCP/PS/07/25	01 Juli 2025	04 Juli 2025 - 04 Juli 2027	Perpanjangan
(6 HACCP	PT. Syam Surya Mandiri	Jln. Propinsi No. 01, Kampung Kajang, Kel. Sungai Meriam, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, East Kalimantan - Indonesia	A A	Frozen Cooked Shrimp Frozen Raw Shrimp	180/PM/HACCP/PB/07/25 181/PM/HACCP/PB/07/25	16 Juli 2025	22 Juli 2025 - 22 Juli 2027	Perpanjangan

Balikpapan, 10 Oktober 2025 Kepala Balai KIPM Balikpapan,

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUYU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Eko Sulystianto

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PASCA PANEN YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan Periode / Tahun : Triwulan III / 2025

No.	Jenis Sertifikasi	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk / Ruang Lingkup	Nomor Sertifikat	Tanggal Terbit Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	SKP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	А	Live Snail	35234/64/SKP/LN/I/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
2	SKP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	А	Live Grouper	35233/64/SKP/LN/I/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
3	SKP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	A	Live Lobster	35232/64/SKP/LN/I/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
4	SKP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	A	Live Eel	35231/64/SKP/LN/I/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
5	SKP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	A	Live Shell	35230/64/SKP/LN/I/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
6	SKP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	А	Live Crab	35235/64/SKP/LN/I/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
7	SKP	PT. Nusaybah Alby Saing	Jalan 21 Januari RT. 047, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	В	Fresh Demersal Fish	35238/64/SKP/SG/I/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
8	SKP	PT. Nusaybah Alby Saing	Jalan 21 Januari RT. 047, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	В	Fresh Pelagic Fish	35237/64/SKP/SG/I/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	
9	SKP	PT. Nusaybah Alby Saing	Jalan 21 Januari RT. 047, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	В	Fresh Shrimp	35236/64/SKP/SG/I/2025	14 Januari 2025	14 Januari 2025 - 14 Januari 2025	

No.	Jenis Sertifikasi	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk / Ruang Lingkup	Nomor Sertifikat	Tanggal Terbit Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
10	SKP	PT. Qisbelian Snack Indonesia	Perumahan Bontang Permai. Jl. Catur VII Blok A No. 17 RT. 07, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Kalimantan Timur	В	Fish Amplang	35283/64/SKP/LN/I/2025	17 Januari 2025	17 Januari 2025 - 17 Januari 2027	
11	SKP	Henny Ernawati Fam	Jl. Pontianak 7, Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur	В	Fish Pempek	35332/64/SKP/LN/I/2025	22 Januari 2025	22 Januari 2025 - 22 Januari 2027	
12	SKP	Dahliya A	JI. Teritip Laut RT. 42 SIKT (Sentra Industri Kecil) Blok A-16, Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	В	Fish Amplang	36031/64/SKP/LN/III/2025	10 Maret 2025	10 Maret 2025 - 10 Maret 2027	
13	SKP	Sugiyo	Jalan Prapatan 2 Gang Kauman Jariya Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	В	Pressed Cooked Milkfish	36490/64/SKP/LN/IV/2025	15 April 2025	15 April 2025 - 15 April 2027	
14	SKP	Sugiyo	Jalan Prapatan 2 Gang Kauman Jariya Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	В	Boiled Fish	36491/64/SKP/LN/IV/2025	15 April 2025	15 April 2025 - 15 April 2027	
15	SKP	Tumirah	JI. Yos Sudarso Gang Keramat RT. 06 Kelurahan Sarijaya Kecamatan Sanga - sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	В	Milkfish Amplang	36874/64/SKP/LN/V/2025	08 Mei 2025	08 Mei 2025 - 08 Mei 2027	
16	SKP	PT. Borneo Ocean Nauly	Jl. Tanjung Harapan Kelurahan Samboja Kuala Kel. Samboja Kuala, Kec. Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	В	Dried Seaweed	36956/64/SKP/LN/V/2025	15 Mei 2025	15 Mei 2025 - 15 Mei 2027	
17	SKP	PT. Sumber Kalimantan Abadi	Jl. Mulawarman No. 99, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	А	Frozen Cooked Shrimp	37860/64/SKP/BK/VII/2025	11 Juli 2025	11 Juli 2025 - 11 Juli 2027	
18	SKP	PT. Sumber Kalimantan Abadi	Jl. Mulawarman No. 99, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	А	Frozen Raw Shrimp	37861/64/SKP/BK/VII/2025	11 Juli 2025	11 Juli 2025 - 11 Juli 2027	
19	SKP	PT. Ocean Paradise Fishery	Jl. Poros Limunjan Gg. Sulawesi RT. 19, Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, Kalimantan Timur	A	Frozen Stingray	38277/64/SKP/BK/VIII/2025	01 Agustus 2025	01 Agustus 2025 - 01 Agustus 2027	

N	. Jenis Sertifikasi	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk / Ruang Lingkup	Nomor Sertifikat	Tanggal Terbit Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
2) SKP	CV. Tiga A (Unit Kampung Baru)	Jl. 21 Januari, Kel. Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	А	Fresh Shrimp	38452/64/SKP/SG/VIII/2025	08 Agustus 2025	08 Agustus 2025 - 08 Agustus 2027	
2	SKP	CV. Tiga A (Unit Kampung Baru)	Jl. 21 Januari, Kel. Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	А	Fresh Pelagic Fish	38453/64/SKP/SG/VIII/2025	08 Agustus 2025	08 Agustus 2025 - 08 Agustus 2027	
2	2 SKP	CV. Tiga A (Unit Manggar)	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Kalimantan Timur	А	Fresh Demersal Fish	38535/64/SKP/SG/VIII/2025	11 Agustus 2025	11 Agustus 2025 - 11 Agustus 2027	
2	3 SKP	CV. Tiga A (Unit Manggar)	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Kalimantan Timur	A	Fresh Swimming Crab	38536/64/SKP/SG/VIII/2025	13 Agustus 2025	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	
2	I SKP	CV. Tiga A (Unit Manggar)	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Kalimantan Timur	A	Fresh Shrimp	38538/64/SKP/SG/VIII/2025	13 Agustus 2025	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	
2	S SKP	CV. Tiga A (Unit Manggar)	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Kalimantan Timur	А	Fresh Pelagic Fish	38540/64/SKP/SG/VIII/2025	13 Agustus 2025	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	
2	S SKP	CV. Tiga A (Unit Kampung Baru)	Jl. 21 Januari, Kel. Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	А	Fresh Demersal Fish	38541/64/SKP/SG/VIII/2025	13 Agustus 2025	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	

Balai Karantina ihan Pencencalaan Miru Dan Kanananan Hasii Pencencalaan Miru Dan Kananan Miru Dan Kananan

Eko Sulystianto

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : RASIO EKSPOR DAN HASIL PERIKANAN YANG DITERIMA OLEH NEGARA

TUJUAN EKSPOR LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN

NAMA TIMJA : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PASCA PANEN

PERIODE LAPORAN : TRIWULAN III / 2025

Nama Sasara Kegiatan	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan									
Nama Indikat Kinerja		Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor								
			T	ahun 20	25			Capaian	apaian Target	
T/R	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan	Tahun 2025	Tahun 2025	
Target	99%	99%	99%	99%					99%	
Realisasi	100%	100%	100%	100%						
% Capaian	101%	101%	101%	101%						

Catatan:

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4

SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2 SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4 Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

 Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa Dan / Atau Hasil Perikanan menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah Negara Republik

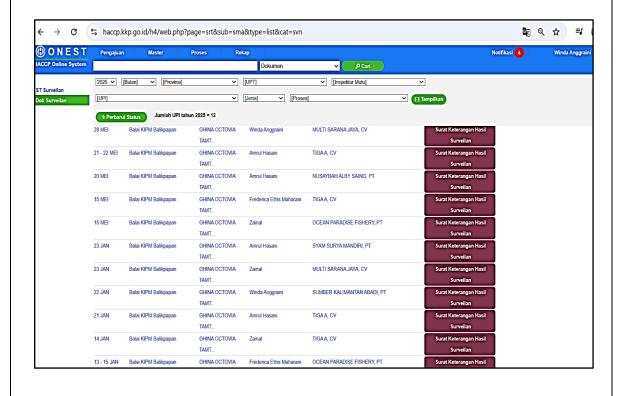
- Indonesia. Perubahan tentang semua hasil perikanan yang keluar dari wilayah Republik Indonesia baik untuk konsumsi maupun non konsumsi wajib disertai dengan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
- 2. Notifikasi dari FDA USA tentang produk udang beku dari Indonesia yang diindikasi terkontaminasi Cesium-137

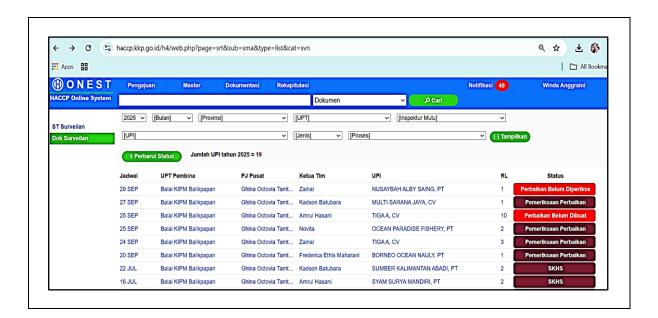
Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

- Capaian indikator diperoleh dengan menghitung jumlah SMKHP yang diterbitkan oleh BKIPM Balikpapan dikurangi jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan dibagi dengan jumlah sertifikat ekspor yang diterbitkan oleh BKIPM Balikpapan
- 2. Capaian indikator dihitung setiap triwulan
- 3. Realisasi terhadap IKU rasio ekspor dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor sebesar 100 % berdasarkan data sebagai berikut :
 - a. Jumlah SMKHP yang diterbitkan oleh BKIPM Balikpapan selama Januari September 2025 sebanyak 1.622 SMKHP
 - b. Tidak ada kasus penolakan produk di negara tujuan ekspor selama Juli September 2025

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

Melakukan pengendalian dan pengawasan penerapan jaminan mutu di Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui kegiatan surveilen penerapan HACCP dan pengambilan contoh sebagai penjaminan mutu produk yang akan diekspor ke negara tujuan. Kegiatan surveilen dan pengambilan contoh dilakukan pada Bulan Juli - September 2025 pada 5 UPI





Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
1. Kegiatan pengawasan penerapan HACCP secara	Timja Pengendalian dan Pengawasan
menyeluruh melalui kegiatan surveilen dan pengambilan contoh di UPI telah dilakukan pada 5 UPI dalam rangka penjaminan mutu produk yang akan disertifikasi ekspor sehingga tidak mengalami penolakan di area negara tujuan	Pasca Panen

Has	sil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab		
1.	Kegiatan pengawasan penerapan HACCP secara	Timja Pengendalian dan Pengawasan		
	menyeluruh melalui kegiatan surveilen dan pengambilan contoh di UPI telah dilakukan pada 5 UPI dalam rangka penjaminan mutu produk yang akan disertifikasi ekspor sehingga tidak mengalami penolakan di area negara tujuan	Pasca Panen		
2.	Pendaftaran nomor registrasi UPI ke negara mitra melalui Aplikasi SIAP MUTU			



REKAPITULASI EKSPOR IKAN DAN HASIL PERIKANAN YANG DITERIMA DI NEGARA TUJUAN EKSPOR LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan Periode / Tahun : Triwulan III / 2025

No.	Bulan	Jenis Produk	Negara Tujuan	Jumlah Sertifikat Ekspor	Jumlah Penolakan Produk Di Negara Tujuan
1	2	3	4	5	6
1	Januari	Udang, Windu, Udang Pink ,Kerapu Segar ,Bawal Putih ,Kakap, Tenggiri, Kuro, Udang Flower	China, Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan, United Kingdom (GB), United States Vietnam	129	0
2	Februari	Udang Windu, Udang Pink, Udang Putih, Kerapu Segar, Udang Vaname, Bawal Putih, Rumput Laut, Kakap, Udang Yellow, Kuro, Tenggiri, Udang CAT, Udang Flower, Kurisi	China, Hong Kong, Japan, Korea Selatan, Malaysia, Singapore, Taiwan, United Kingdom (GB), United States	147	0
3	Maret	Udang Windu, Udang Pink, Bawal Putih, Kerapu Segar, Udang Putih, Rumput Laut, Kakap, Kuro, Tenggiri, Udang Flower, Kurisi	China, Hong Kong, Japan, Korea Selatan, Malaysia, Singapore, Taiwan, United Kingdom (GB), United States	123	0
4	April	Udang, Windu, Udang Pink, Udang Putih, Bawal Putih, Tenggiri Segar, Kerapu Segar, Udang Yellow, Rumput Laut, Udang CAT, Kakap Segar, Layur Segar, Kuro, Udang Flower.	Japan, United States, Taiwan, United Kingdom (GB), Vietnam, Malaysia, Hong Kong, China, Singapore, Korea Selatan	153	0
5	Mei	Udang Windu, Udang Pink, Udang Putih, Kepiting Hidup, Belut Hidup, Bawal Putih, Kerapu Segar, Tenggiri Segar, Kakap Segar, Kuro, Layur Segar, Ikan Kalam Beku, Kerapu Beku, Udang Flower, Ikan, Lidah Beku, Ikan kurisi Bali	Japan, United Kingdom (GB), China, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Taiwan	206	0

No.	Bulan	Jenis Produk	Negara Tujuan	Jumlah Sertifikat Ekspor	Jumlah Penolakan Produk Di Negara Tujuan
1	2	3	4	5	6
6	Udang Windu, Udang Pink, Bawal Putih, Kerapu Segar, Tenggiri Segar, Kuro, Juni Udang Yellow, Kakap Segar, Layur Segar, Udang CAT, Udang Galah, Udang Putih, Udang Flower		Japan, Taiwan, China, United Kingdom (GB), Hong Kong, Singapore, Malaysia	225	0
	Juli	Udang Windu, Udang Pink, Bawal Putih, Kerapu Segar, Udang Putih, Tenggiri Segar, Kuro, Kakap Segar, Katambak Segar, Kakatua Segar, Layur Segar, Ikan kurisi Bali.	United States, Japan, United Kingdom (GB), China, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Arab Saudi	244	0
	Agustus	Udang Windu, Udang Pink, Bawal Putih, Kerapu Segar, Rumput Laut, Kuro, Tenggiri Segar, Udang Yellow, Kakap Segar, Udang Putih, Katambak Segar, Layur Segar, Kakatua Segar, Udang CAT, Ikan kurisi Bali.	Japan, United Kingdom (GB), China, Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Singapore, India, Arab Saudi.	217	0
	Udang Windu, Udang Pink, Bawal Putih, Kerapu Segar, Tenggiri Segar, Kuro, September Kakap Segar, Layur Segar, Katambak Segar, Kakatua Bungkuk Hijau, Kakatua Segar, Ikan kurisi Bali.		United States, Japan, United Kingdom (GB), China, Taiwan, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Arab Saudi.	178	0
	Tot	tal Sertifikat Ekspor Yang Diterima di	Negara Tujuan	1.622	0

Balikpapan, 10 Oktober 2025

Balai Karantina ikan
Pengendalian mutu dan
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIK INDONE

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN

UNTUK PERBAIKAN KINERJA

NAMA TIMJA : DUKUNGAN MANAJERIAL

PERIODE LAPORAN : TRIWULAN III / 2025

Nama Sasaran

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

Kegiatan Perikanan

Nama Indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk

Kinerja • perbaikan kinerja

11111011			p o i b a i i a i i	- turrerju					
			Capaian	Target					
T/R	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan	Tahun 2025	Tahun 2025
Target	85%	85%	85%	85%					85%
Realisasi	100%	100%	100%	100%					
% Capaian	117,65%	117,65%	117,65%	117,65%					

Catatan:

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4

SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2 SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4 Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan pengawasan dalam mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara Inspektorat Jenderal dengan satker yang diperiksa melalui Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK) adalah aplikasi berbasis Web.

Modul Aplikasi SIDAK (SISTEM INFORMASI DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAAN APIP KKP) dirancang dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan aplikasi, serta membantu Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Aplikasi SIDAK dapat diakses melalui url https://sidak.kkp.go.id Untuk akses yang optimal gunakan browser google chrome Saat mengakses url tersebut, Anda akan melihat langsung halaman login aplikasi

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

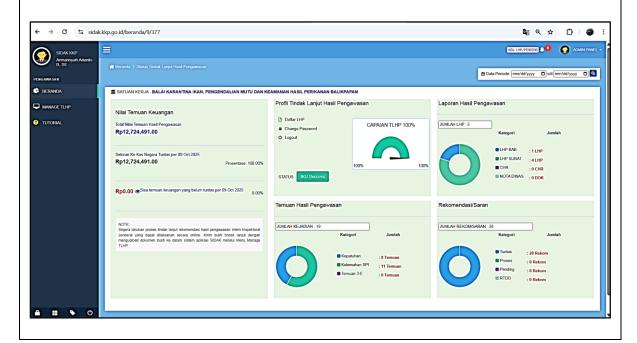
- 1. Dokumen yang telah dirilis atau diupload pada aplikasi SIDAK bersifat RAHASIA, dimohon untuk tidak mempublikasikan dokumen ini secara publik.
- 2. Profiling User Management (Profil Pengguna Aplikasi SIDAK) sangat diperlukan untuk mengetahui akses pengguna aplikasi SIDAK. Dengan adanya profil pengguna akan sangat membantu admin dalam melihat pengguna sesuai dengan akses yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjaga agar akses LHP tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Dengan mengatahui data Pengguna, Admin dapat memetakan hak akses untuk setiap tingkatan unit kerja.

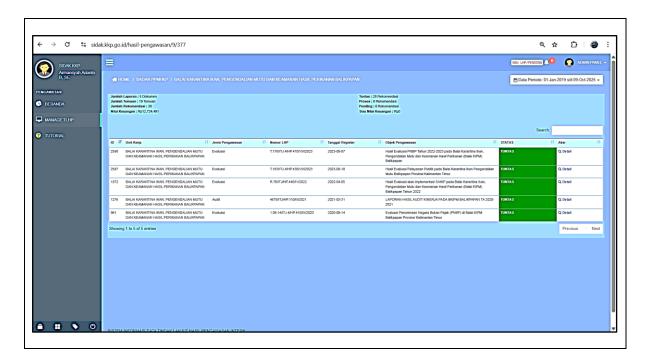
Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

- Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan berfungsi untuk melihat data hasil laporan pengawasan yang telah dilklasifikasikan pada beberapa bentuk dokumen LHP yang resmi diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal yaitu LHP bentuk BAB, Surat, Catatan Hasil Reviu ataupun Nota Dinas yang disampaikan kepada auditi dalam setiap kegiatan pengawasan.
- 2. Prosentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan berfungsi untuk menyajikan data prosentase tindak lanjut hasil pengawasan. Prosentase disajikan dalam diagram jarum jam yang merupakan capaian indikator kinerja TLHP. Jika capaianan melebihi target 80% akan memunculkan status SUKSES berwarna hijau sebaliknya jika kurang dari 80% akan memunculkan status FAILED berwarna merah.
- 3. Temuan Hasil Pengawasan berfungsi untuk melihat jumlah temuan/kejadian hasil pengawasan. Temuan hasil pengawasan diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok temuan yaitu Kepatuhan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis
- 4. Jumlah Rekomendasi Pengawasan berfungsi untuk melihat jumlah rekomendasi/saran yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan. Temuan hasil pengawasan diklasifikasikan ke dalam 4 kategori rekomendasi sesuai dengan status rakomendasi Tuntas, Proses, Pending, Temuan hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD).
- 5. Nilai Temuan Keuangan berfungsi untuk melihat nilai temuan keuangan yang bersifat potensi kerugian keuangan negara yang berasal dari hasil kegiatan pengawasan. Pada fitur ini juga menampilkan nilai keuangan yang telah didindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sehingga menggambarkan prosentase tindak lanjut temuan keuangan.
- 6. Capaian indikator dihitung setiap terdapat kegiatan pengawasan pada satker

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

Profil TLHP yang menampilkan profil temuan dengan status TUNTAS warna HIJAU, PROSES warna ORANGE, PENDING warna MERAH.





Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Memantau dan Menindak Lanjuti jika terdapat Laporan Hasil	Timja Dukungan Manajerial
Pemeriksaan pada aplikasi SIDAK	

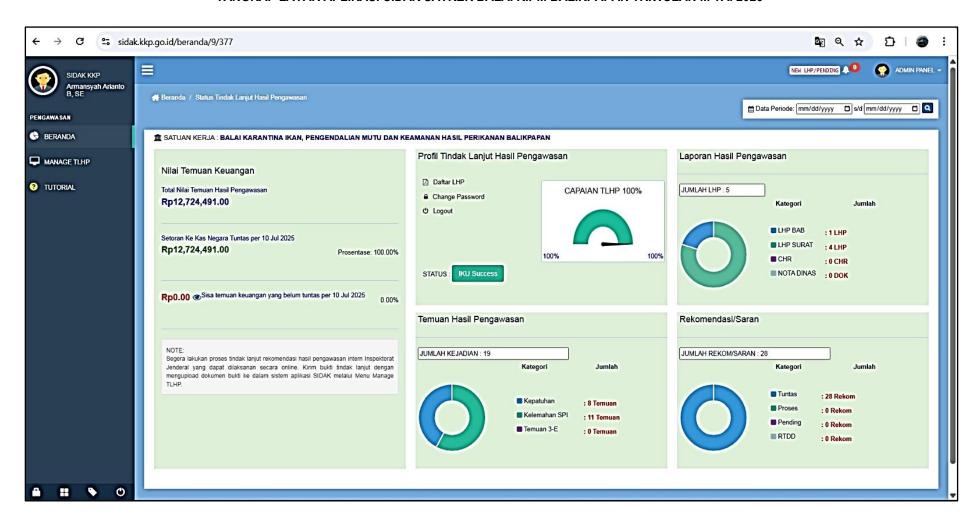
Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Tidak ada temuan BPK pada tahun anggaran 2025	Timja Dukungan Manajerial

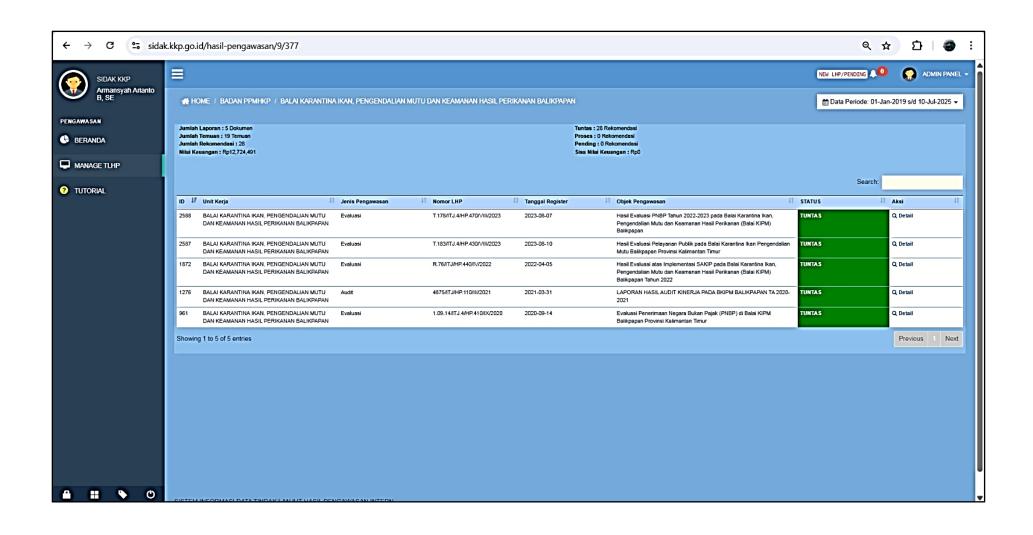
BALAI KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEANANAN HASIL PERIKANAN
BALIKPAPAN

Eko Sulystianto

BLIK INDO

TANGKAP LAYAR APLIKASI SIDAK SATKER BALAI KIPM BALIKPAPAN TRIWULAN III TA. 2025





LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP

LINGKUP UPT BKIPM BALIKPAPAN

NAMA TIMJA : DUKUNGAN MANAJERIAL

PERIODE LAPORAN : TRIWULAN III / 2025

Nama Sasara Kegiatan	n	:	Bidang	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
Nama Indikat Kinerja		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT BKIPM Balikpapan									
			Capaian	Target							
T/R	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan	Tahun 2025	Tahun 2025		
Target	76%	76%	76%	76%					76 %		
Realisasi	100%	100%	100%	100%							
% Capaian	120%	120%	120%	120%							

Catatan:

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4

SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2 SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4 Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasinya

- Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.
- Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP
- Nilai Rencana Umum PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP / Pagu Pengadaan Barang Jasa x 100 %
- Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100 %, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

- Dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan)
- 2. Balai KIPM Balikpapan telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen)
- Dari file excel Form Klarifikasi Belanja PBJ Pasca Revisi Balai KIPM Balikpapan Pagu RUP Pasca Revisi (setelah efisiensi belanja) yang terumumkan tidak ada selisih maka RUP yang terumumkan di aplikasi terkonfirmasi 100%

Akar Masalah:

Dalam penilaian IKU RUP Biro Umum dan PBJ tidak mengeluarkan nilai per satker/UPT melainkan per eselon sehingga jika ada satker yg blum 100% capaian IKU RUP PBJ maka nilai capaian kinerja eselon menjadi kurang dari 100%. Terlampir dalam nota dinas penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 tahun anggaran 2025

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

Penyampaian Rekap Hasil Capaian IKU Rencana Umum Pengadaan Tahun 2025 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lingkup BPPMHKP pada Triwulan III Tahun 2025 dan Nota Dinas Sekjen NOMOR 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tanggal 08 Oktober 2025 tentang Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan III tahun anggaran 2025

		K	B REST API - SIRUP			APLIKASI SIRUP		Selisih Te	rumumkan	
NO	Nama Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN		Total RUP	Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan		% RUP
	The state of the s		RUP Swakelola	TOTAL	Penyedia	Swakelola	Terumumkan	Penyedia	Swakelola	TERUMUMKAN
		∑ Nilai RUP	∑ Nilal RUP	∑ Nilai RUP	∑ Nilai RUP	∑ Nilai RUP	∑ Nilai RUP	∑ Nilai RUP	∑ Nilai RUP	
	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN - (13)	43,322,446,122	432,358,000	43,754,804,122	43,322,446,122	432,358,000	43,754,804,122			100.00%
,	BALAI BESAR KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	2,892,982,000		2,892,982,000	2.892.982,000		2,892,982,000			100.00%
2	BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	454,583,300		454,583,300	454,583,300		454,583,300			100.00%
3	BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	945,341,324		945,341,324	945,341,324		945,341,324	13.5%		100.00%
4	BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	254,838,000	373,548,000	628,386,000	254,838,000	373,548,000	628,386,000	(*)		100.00%
5	BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	565,163,000		565,163,000	565,163,000		565,163,000	-	120	100.00%
- 6	BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	1,784,010,000		1,784,010.000	1,784,010,000		1,784,010,000	-		100.00%
7	BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	1,857,219,000		1,857,219.000	1.857.219.000	V	1.857.219.000		0.500	100.00%
8	BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	399,150,000		399,150,000	399,150,000		399,150,000			100.00%
9	BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	1,711,693,000		1,711,693,000	1,711,693,000		1,711,693,000	-	-	100.00%
10	BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	1,082,514,000		1,082,514,000	1.082,514,000		1,082,514,000	950		100.00%
11	BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	2,227,785,000		2,227,785,000	2.227.785,000		2.227.785,000			100.00%
12	BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	1,486,140,000		1,486,140,000	1,486,140,000		1,486,140,000			100.00%
13	BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	4,601,969,000		4,601,969,000	4.601,969,000		4.601.969,000	2.02		100.00%
14	BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	154,755,800		154,755,800	154,755,800		154,755,800	(5.0)	(4)	100.00%
15	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	2,714,969,000		2,714,969,000	2.714,969,000		2,714,969,000	5940		100.00%
16	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,369,048,000		6,369,048,000	6,369,048,000		6,369,048,000			100.00%
17	STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	351,241,000		351,241,000	351,241,000		351.241,000	8.58		100.00%
18	STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	35,000,000		35,000,000	35,000,000		35,000,000	(*0	-	100.00%
19	STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	338,737,000		338,737,000	338,737,000		338,737,000			100.00%
20	STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	1,035,194,000		1,035,194,000	1,035,194,000		1,035,194,000		120	100.00%

Rekomendasi Renaksi untuk TW berikutnya	Penanggung Jawab
Koordinasi dengan satker/UPT BPPMHKP yang lain sehingga dapat mengumumkan RUP dengan kertas kerja klarifikasi yg sesuai (tidak ada selisih) sehingga nilai capaian dapat tercapai secara optimal sebesar 100 %	Timja Dukungan Manajerial

Hasil TL Rekomendasi Renaksi TW sebelumnya	Penanggung Jawab
_	Timja Dukungan Manajerial

Balikpapan, 10 Oktober 2025

epala Balai KIPM Balikpapan

BALAI KARAHTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALIKPAPAN

Eko Sulystianto COUBLIK INDONE

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUYU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS NOMOR 381/SJ.7/PL.410/X/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal

2. Sekretaris Inspektorat Jenderal

- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
- 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- 10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase

Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan

pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas Tanggal : 8 Oktober 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 149 Satuan kerja (satker) yang tersebar di 9 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

2

Formulasi pengukuran/penilaian:

Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP x 100%

Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan

sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih

persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang

terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan

capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap

Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun

Anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu cut off data untuk

perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 8 Oktober 2025 pukul 11.00

WIB, secara keseluruhan satuan kerja telah mencapai persentase 100,00%.

Demikian disampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait

dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami

ucapkan terima kasih.

Teguh Wibowo

Tembusan:

Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 381/SJ.7/PL.410/X/2025

Tanggal: 8 Oktober 2025

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode				Persentase RUP Terum	0/ Tarret	% Capaian			
E1	Nama Unit Eselon 1		Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan	% Target IKU TW 3	Target IKU TW 3	Keterangan
02	Inspektorat Jenderal	1	5,976,879,000	5,976,879,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,132,182,915,103	1,132,182,915,103	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	43,754,804,122	43,754,804,122	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	875,549,848,134	875,549,848,134	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	51,933,565,281	51,933,565,281	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	5,976,879,000	5,976,879,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	336,649,816,000	336,649,816,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	1,081,158,327,186	1,081,158,327,186	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	342,443,130,996	342,443,130,996	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
	TOTAL	149	3,875,626,164,822	3,875,626,164,822				100.00%	

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 381/SJ.7/PL.410/X/2025

Tanggal: 8 Oktober 2025

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2025 PER SATUAN KERJA

Inspektorat Jenderal

		Nama_Satker		PAGU PENGADAAN		REKAP	PAGU TERUMUMKAN	Selisih		
	10			TW-3			TW3	Pagu Pengadaan -	% RUP	
		_	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	Pagu Terumumkan TW3	TERUMUMKAN
В		Inspektorat Jenderal	5,976,879,000		5,976,879,000	5,976,879,000	-	5,976,879,000	-	100.00%
	1	INSPEKTORAT JENDERAL	5,976,879,000	-	5,976,879,000	5,976,879,000		5,976,879,000	-	100.00%

♣ Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

			PAGU PENGADAAN		REKAP P	AGU TERUMUMKAN	(SIRUP)	Selisih		
NO	Nama_Satker		TW-3			TW3	Pagu Pengadaan -	% RUP		
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	Pagu Terumumkan TW3	TERUMUMKAN	
D	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	103,641,596,000	28,942,973,000	132,584,569,000	103,641,596,000	28,942,973,000	132,584,569,000	-	100.00%	
1	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	8,346,508,000		8,346,508,000	8,346,508,000	-	8,346,508,000	-	100.00%	
2	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	11,611,482,000		11,611,482,000	11,611,482,000	-	11,611,482,000	•	100.00%	
3	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	8,049,166,000		8,049,166,000	8,049,166,000	-	8,049,166,000	1	100.00%	
4	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	29,905,446,000	11,145,622,000	41,051,068,000	29,905,446,000	11,145,622,000	41,051,068,000	•	100.00%	
5	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,980,003,000		3,980,003,000	3,980,003,000	-	3,980,003,000	•	100.00%	
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	12,951,236,000	3,327,515,000	16,278,751,000	12,951,236,000	3,327,515,000	16,278,751,000	•	100.00%	
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	7,192,845,000	653,692,000	7,846,537,000	7,192,845,000	653,692,000	7,846,537,000	•	100.00%	
8	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	4,931,932,000		4,931,932,000	4,931,932,000	-	4,931,932,000	-	100.00%	
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	2,672,146,000	3,163,875,000	5,836,021,000	2,672,146,000	3,163,875,000	5,836,021,000	-	100.00%	
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	4,193,405,000	4,999,652,000	9,193,057,000	4,193,405,000	4,999,652,000	9,193,057,000	•	100.00%	
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	1,484,027,000	1,597,437,000	3,081,464,000	1,484,027,000	1,597,437,000	3,081,464,000	-	100.00%	
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	6,583,509,000	160,000,000	6,743,509,000	6,583,509,000	160,000,000	6,743,509,000	-	100.00%	
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	1,739,891,000	3,895,180,000	5,635,071,000	1,739,891,000	3,895,180,000	5,635,071,000	-	100.00%	
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	1,253,261,000		1,253,261,000	1,253,261,000	-	1,253,261,000	-	100.00%	
15	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	5,010,473,000	2,314,090,000	7,324,563,000	5,010,473,000	2,314,090,000	7,324,563,000	-	100.00%	
16	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	986,349,204,103	4,671,318,000	991,020,522,103	986,349,204,103	4,671,318,000	991,020,522,103	-	100.00%	

♣ Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

			PAGU PENGADAAN		REKAP P	AGU TERUMUMKAN	(SIRUP)	Selisih	
NO	Nama_Satker		TW-3			TW3		Pagu Pengadaan -	% RUP
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	Pagu Terumumkan TW3	TERUMUMKAN
н	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	132,793,483,168	23,016,799,000	155,810,282,168	132,793,483,168	23,016,799,000	155,810,282,168	-	100.00%
1	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	815,181,000	1,030,758,000	1,845,939,000	815,181,000	1,030,758,000	1,845,939,000	-	100.00%
2	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	2,534,284,000		2,534,284,000	2,534,284,000	-	2,534,284,000	-	100.00%
3	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	5,100,517,000		5,100,517,000	5,100,517,000		5,100,517,000	-	100.00%
4	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	96,216,000		96,216,000	96,216,000		96,216,000	-	100.00%
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	385,776,000	1,222,141,000	1,607,917,000	385,776,000	1,222,141,000	1,607,917,000	-	100.00%
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	1,705,088,000	4,944,580,000	6,649,668,000	1,705,088,000	4,944,580,000	6,649,668,000	-	100.00%
7	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	1,861,945,000		1,861,945,000	1,861,945,000		1,861,945,000	-	100.00%
8	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	1,947,816,000		1,947,816,000	1,947,816,000		1,947,816,000	-	100.00%
9	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	17,074,273,000		17,074,273,000	17,074,273,000		17,074,273,000	-	100.00%
10	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	1,453,775,000		1,453,775,000	1,453,775,000		1,453,775,000	-	100.00%
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBIH	2,378,245,000		2,378,245,000	2,378,245,000		2,378,245,000	-	100.00%
12	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN BRPI	3,550,829,000		3,550,829,000	3,550,829,000		3,550,829,000	-	100.00%
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	1,868,698,000		1,868,698,000	1,868,698,000		1,868,698,000	-	100.00%
14	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,372,192,000	197,970,000	4,570,162,000	4,372,192,000	197,970,000	4,570,162,000	-	100.00%
15	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,760,962,000		4,760,962,000	4,760,962,000		4,760,962,000	-	100.00%
16	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	902,114,000		902,114,000	902,114,000		902,114,000	-	100.00%
17	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,685,011,000	103,084,000	5,788,095,000	5,685,011,000	103,084,000	5,788,095,000	-	100.00%
18	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	190,204,000	1,265,939,000	1,456,143,000	190,204,000	1,265,939,000	1,456,143,000	-	100.00%
19	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRBRL	435,469,000	56,885,000	492,354,000	435,469,000	56,885,000	492,354,000	-	100.00%
20	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	439,115,000	480,771,000	919,886,000	439,115,000	480,771,000	919,886,000	-	100.00%
21	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LRPT	1,930,550,000		1,930,550,000	1,930,550,000	-	1,930,550,000	-	100.00%
22	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR LRSDKP	1,035,654,000	1,053,546,000	2,089,200,000	1,035,654,000	1,053,546,000	2,089,200,000	-	100.00%
23	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	14,749,211,000		14,749,211,000	14,749,211,000		14,749,211,000	-	100.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	1,797,869,000		1,797,869,000	1,797,869,000		1,797,869,000	-	100.00%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	572,296,000	2,363,918,000	2,936,214,000	572,296,000	2,363,918,000	2,936,214,000	-	100.00%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	848,422,000	837,013,000	1,685,435,000	848,422,000	837,013,000	1,685,435,000	-	100.00%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	658,207,000	1,078,219,000	1,736,426,000	658,207,000	1,078,219,000	1,736,426,000	-	100.00%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	28,407,071,644		28,407,071,644	28,407,071,644	-	28,407,071,644	-	100.00%
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,250,072,524	1,221,557,000	2,471,629,524	1,250,072,524	1,221,557,000	2,471,629,524	-	100.00%
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,012,876,000		2,012,876,000	2,012,876,000		2,012,876,000	-	100.00%

			PAGU PENGADAAN		REKAP P	AGU TERUMUMKAN	(SIRUP)	Selisih	0/ 5/15
NO	Nama Satker		TW-3	TW3			Pagu Pengadaan -	% RUP	
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	Pagu Terumumkan TW3	TERUMUMKAN
н	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	132,793,483,168	23,016,799,000	155,810,282,168	132,793,483,168	23,016,799,000	155,810,282,168		100.00%
31	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	7,515,109,000	-	7,515,109,000	7,515,109,000		7,515,109,000	-	100.00%
32	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	2,195,333,000	5,209,960,000	7,405,293,000	2,195,333,000	5,209,960,000	7,405,293,000	•	100.00%
33	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,284,200,000		7,284,200,000	7,284,200,000		7,284,200,000	ı	100.00%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	1,296,505,000		1,296,505,000	1,296,505,000		1,296,505,000	-	100.00%
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	439,179,000	1,950,458,000	2,389,637,000	439,179,000	1,950,458,000	2,389,637,000	-	100.00%
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	1,814,020,000		1,814,020,000	1,814,020,000		1,814,020,000	•	100.00%
37	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	785,173,000		785,173,000	785,173,000		785,173,000	•	100.00%
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	644,025,000		644,025,000	644,025,000		644,025,000	-	100.00%
39	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	1,109,942,000		1,109,942,000	1,109,942,000		1,109,942,000	-	100.00%
40	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	754,234,000	1,209,683,000	1,963,917,000	754,234,000	1,209,683,000	1,963,917,000	-	100.00%
41	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP	716,506,016,966		716,506,016,966	716,506,016,966		716,506,016,966	-	100.00%
42	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	159,690,000		159,690,000	159,690,000	-	159,690,000	-	100.00%

♣ Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

			PAGU PENGADAAN		REKAP F	PAGU TERUMUMKAN	(SIRUP)	Selisih	
NO	Nama Satker		TW-3			TW3		Pagu Pengadaan -	% RUP
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	Pagu Terumumkan TW3	TERUMUMKAN
1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	-	100.00%
1	BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR	2,892,982,000		2,892,982,000	2,892,982,000		2,892,982,000	-	100.00%
2	BALAI KIPM dan KHP BALIKPAPAN	454,583,300		454,583,300	454,583,300		454,583,300	-	100.00%
3	BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG	945,341,324		945,341,324	945,341,324		945,341,324	-	100.00%
4	BALAI KIPM dan KHP AMBON	254,838,000	373,548,000	628,386,000	254,838,000	373,548,000	628,386,000	-	100.00%
5	BALAI KIPM dan KHP BANJARMASIN	565,163,000		565,163,000	565,163,000		565,163,000	-	100.00%
6	BALAI KIPM dan KHP DENPASAR	1,784,010,000		1,784,010,000	1,784,010,000		1,784,010,000	-	100.00%
7	BALAI KIPM dan KHP JAKARTA II	1,857,219,000		1,857,219,000	1,857,219,000		1,857,219,000	-	100.00%
8	BALAI KIPM dan KHP JAYAPURA	399,150,000		399,150,000	399,150,000		399,150,000	-	100.00%
9	BALAI KIPM dan KHP MANADO	1,711,693,000		1,711,693,000	1,711,693,000		1,711,693,000	•	100.00%
10	BALAI KIPM dan KHP MATARAM	1,082,514,000		1,082,514,000	1,082,514,000		1,082,514,000	-	100.00%

			PAGU PENGADAAN		REKAP P	AGU TERUMUMKAN	(SIRUP)	Selisih	
NO	Nama Satker		TW-3			TW3		Pagu Pengadaan -	% RUP
	raina_canoi	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	Pagu Terumumkan TW3	TERUMUMKAN
1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	-	100.00%
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN I	2,227,785,000		2,227,785,000	2,227,785,000		2,227,785,000	-	100.00%
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,486,140,000		1,486,140,000	1,486,140,000		1,486,140,000	-	100.00%
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA I	4,601,969,000		4,601,969,000	4,601,969,000		4,601,969,000	-	100.00%
14	BALAI KIPM dan KHP TARAKAN	154,755,800		154,755,800	154,755,800		154,755,800	-	100.00%
15	BALAI UJI STANDAR KIPM dan KHP	2,714,969,000		2,714,969,000	2,714,969,000		2,714,969,000	-	100.00%
16	SEKRETARIAT BPPMHKP	6,369,048,000		6,369,048,000	6,369,048,000		6,369,048,000	-	100.00%
17	STASIUN KIPM dan KHP KENDARI	351,241,000		351,241,000	351,241,000		351,241,000	-	100.00%
18	STASIUN KIPM dan KHP MAMUJU	35,000,000		35,000,000	35,000,000		35,000,000	-	100.00%
19	STASIUN KIPM dan KHP SORONG	338,737,000		338,737,000	338,737,000		338,737,000	-	100.00%
20	STASIUN KIPM dan KHP ACEH	1,035,194,000		1,035,194,000	1,035,194,000		1,035,194,000	-	100.00%
21	STASIUN KIPM dan KHP BATAM	1,351,261,698		1,351,261,698	1,351,261,698		1,351,261,698	-	100.00%
22	STASIUN KIPM dan KHP BENGKULU	436,771,000		436,771,000	436,771,000		436,771,000	-	100.00%
23	STASIUN KIPM dan KHP CIREBON	2,045,141,000		2,045,141,000	2,045,141,000		2,045,141,000	-	100.00%
24	STASIUN KIPM dan KHP GORONTALO	226,766,000		226,766,000	226,766,000		226,766,000	-	100.00%
25	STASIUN KIPM dan KHP JAMBI	190,000,000		190,000,000	190,000,000		190,000,000	-	100.00%
26	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	-	58,810,000	58,810,000	-	58,810,000	58,810,000	-	100.00%
27	STASIUN KIPM dan KHP MERAK	658,352,000		658,352,000	658,352,000		658,352,000	-	100.00%
28	STASIUN KIPM dan KHP MERAUKE	768,055,000		768,055,000	768,055,000		768,055,000	-	100.00%
29	STASIUN KIPM dan KHP PADANG	744,295,000		744,295,000	744,295,000		744,295,000	-	100.00%
30	STASIUN KIPM dan KHP PALANGKARAYA	664,903,000		664,903,000	664,903,000		664,903,000	-	100.00%
31	STASIUN KIPM dan KHP PALEMBANG	687,840,000		687,840,000	687,840,000		687,840,000	-	100.00%
32	STASIUN KIPM dan KHP PALU	474,690,000		474,690,000	474,690,000		474,690,000	-	100.00%
33	STASIUN KIPM dan KHP PANGKAL PINANG	1,006,732,000		1,006,732,000	1,006,732,000		1,006,732,000	-	100.00%
34	STASIUN KIPM dan KHP PEKANBARU	392,002,000		392,002,000	392,002,000		392,002,000	-	100.00%
35	STASIUN KIPM dan KHP PONTIANAK	1,490,057,000		1,490,057,000	1,490,057,000		1,490,057,000	-	100.00%
36	STASIUN KIPM dan KHP TERNATE	112,965,000		112,965,000	112,965,000		112,965,000	-	100.00%
37	STASIUN KIPM dan KHP YOGYAKARTA	810,283,000		810,283,000	810,283,000		810,283,000	-	100.00%

♣ Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

				PAGU PENGADAAN		REKAP	PAGU TERUMUMKAI	N (SIRUP)	Selisih	
	NO	Nama_Satker	TW-3				TW3		Pagu Pengadaan -	% RUP
		_	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	Pagu Terumumkan TW3	TERUMUMKAN
F	-	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	12,743,424,000	1	12,743,424,000	12,743,424,000	-	12,743,424,000	-	100.00%
	11	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,743,424,000		12,743,424,000	12,743,424,000		12,743,424,000	-	100.00%
		SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	39,190,141,281		39,190,141,281	39,190,141,281		39,190,141,281	-	100.00%

♣ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

			PAGU PENGADAAN		REKAP	PAGU TERUMUMKAN	N (SIRUP)	Selisih	
NO	Nama_Satker		TW-3			TW3		Pagu Pengadaan -	% RUP
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	Pagu Terumumkan TW3	TERUMUMKAN
C	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	454,445,909,663	2,825,805,000	457,271,714,663	454,445,909,663	2,825,805,000	457,271,714,663	-	100.00%
1	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,359,556,000	590,438,000	4,949,994,000	4,359,556,000	590,438,000	4,949,994,000	-	100.00%
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	1,472,698,000	2,235,367,000	3,708,065,000	1,472,698,000	2,235,367,000	3,708,065,000		100.00%
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	4,447,072,000		4,447,072,000	4,447,072,000		4,447,072,000	•	100.00%
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	3,539,681,000		3,539,681,000	3,539,681,000	-	3,539,681,000		100.00%
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	437,742,234,663		437,742,234,663	437,742,234,663		437,742,234,663	ı	100.00%
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	2,884,668,000		2,884,668,000	2,884,668,000		2,884,668,000	ı	100.00%
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	2,019,499,000		2,019,499,000	2,019,499,000	-	2,019,499,000	-	100.00%
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	3,915,697,000		3,915,697,000	3,915,697,000	-	3,915,697,000	•	100.00%
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,200,792,000		2,200,792,000	2,200,792,000		2,200,792,000	ı	100.00%
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,158,531,231,000		1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	-	1,158,531,231,000	-	100.00%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,103,286,000		2,103,286,000	2,103,286,000		2,103,286,000	ı	100.00%
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	850,730,000	2,026,728,000	2,877,458,000	850,730,000	2,026,728,000	2,877,458,000	ı	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	1,208,763,000	6,400,000	1,215,163,000	1,208,763,000	6,400,000	1,215,163,000		100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	157,451,000	1,718,681,000	1,876,132,000	157,451,000	1,718,681,000	1,876,132,000	ı	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2,872,026,000		2,872,026,000	2,872,026,000	-	2,872,026,000		100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,941,647,000	37,642,000	1,979,289,000	1,941,647,000	37,642,000	1,979,289,000	-	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,089,461,000		2,089,461,000	2,089,461,000	-	2,089,461,000	-	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	3,869,917,000	2,672,013,000	6,541,930,000	3,869,917,000	2,672,013,000	6,541,930,000	-	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	59,278,619,000	31,000,000	59,309,619,000	59,278,619,000	31,000,000	59,309,619,000	-	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	2,358,509,000	_	2,358,509,000	2,358,509,000	-	2,358,509,000	-	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	4,130,340,800		4,130,340,800	4,130,340,800	-	4,130,340,800	-	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	35,948,521,000		35,948,521,000	35,948,521,000	-	35,948,521,000	-	100.00%
23	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	15,847,989,000		15,847,989,000	15,847,989,000	-	15,847,989,000	-	100.00%
24	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1,250,409,662,000	25,516,762,000	1,275,926,424,000	1,250,409,662,000	25,516,762,000	1,275,926,424,000	-	100.00%

♣ Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

			PAGU PENGADAAN		REKAP	PAGU TERUMUMKAN	I (SIRUP)	Selisih	
NO	Nama Satker		TW-3			TW3		Pagu Pengadaan -	% RUP
		∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	Pagu Terumumkan TW3	TERUMUMKAN
E	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	336,647,410,000	2,406,000	336,649,816,000	336,647,410,000	2,406,000	336,649,816,000		100.00%
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	17,690,544,000		17,690,544,000	17,690,544,000	-	17,690,544,000	-	100.00%
2	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	11,018,108,000		11,018,108,000	11,018,108,000	-	11,018,108,000	•	100.00%
3	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	19,093,772,000		19,093,772,000	19,093,772,000	-	19,093,772,000	-	100.00%
4	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	16,268,690,000		16,268,690,000	16,268,690,000	-	16,268,690,000	-	100.00%
5	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	16,699,218,500		16,699,218,500	16,699,218,500	-	16,699,218,500	•	100.00%
6	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	16,767,797,500		16,767,797,500	16,767,797,500	•	16,767,797,500	•	100.00%
7	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP	163,921,048,000		163,921,048,000	163,921,048,000	-	163,921,048,000	-	100.00%
8	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	14,283,210,000		14,283,210,000	14,283,210,000	-	14,283,210,000	•	100.00%
9	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	16,166,999,000		16,166,999,000	16,166,999,000	-	16,166,999,000	-	100.00%
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	7,725,242,000	2,406,000	7,727,648,000	7,725,242,000	2,406,000	7,727,648,000	-	100.00%
11	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	9,389,614,000		9,389,614,000	9,389,614,000	•	9,389,614,000	•	100.00%
12	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	5,318,969,000		5,318,969,000	5,318,969,000	-	5,318,969,000	-	100.00%
13	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	8,976,008,000		8,976,008,000	8,976,008,000	-	8,976,008,000	-	100.00%
14	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	7,059,085,000		7,059,085,000	7,059,085,000	-	7,059,085,000	-	100.00%
15	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,269,105,000		6,269,105,000	6,269,105,000	-	6,269,105,000		100.00%

■ Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

				PAGU PENGADAAN		REKAP	PAGU TERUMUMKAN	N (SIRUP)	Selisih	
N	10	Nama_Satker		TW-3		TW3			Pagu Pengadaan -	% RUP
			∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	Pagu Terumumkan TW3	TERUMUMKAN
G		Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	89,119,323,985	-	89,119,323,985	89,119,323,985	-	89,119,323,985	-	100.00%
	1	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	26,318,377,000		26,318,377,000	26,318,377,000		26,318,377,000	-	100.00%
	2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	2,914,499,000		2,914,499,000	2,914,499,000		2,914,499,000	-	100.00%
	3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	5,826,547,000		5,826,547,000	5,826,547,000		5,826,547,000	-	100.00%
	4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	19,206,467,000		19,206,467,000	19,206,467,000		19,206,467,000	-	100.00%
	5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,343,328,000		2,343,328,000	2,343,328,000		2,343,328,000	-	100.00%
	6	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	3,217,528,985		3,217,528,985	3,217,528,985		3,217,528,985	-	100.00%
	7	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	3,062,287,000		3,062,287,000	3,062,287,000		3,062,287,000	-	100.00%
	8	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	26,230,290,000		26,230,290,000	26,230,290,000		26,230,290,000	-	100.00%
	9	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	941,754,537,201	50,284,466,000	992,039,003,201	941,754,537,201	50,284,466,000	992,039,003,201	-	100.00%

Sekretariat Jenderal

			PAGU PENGADAAN REKAP PAGU TERUMUMI		PAGU TERUMUMKAN	I (SIRUP)	Selisih			
	10	Nama_Satker		TW-3					Pagu Pengadaan -	% RUP
			∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	∑ RUP PENYEDIA	∑ RUP SWAKELOLA	∑ RUP	Pagu Terumumkan TW3	TERUMUMKAN
A		Sekretariat Jenderal	328,436,495,996	14,006,635,000	342,443,130,996	328,436,495,996	14,006,635,000	342,443,130,996	-	100.00%
	1	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	10,053,931,000		10,053,931,000	10,053,931,000	-	10,053,931,000	-	100.00%
	2	BIRO UMUM dan PBJ SETJEN KKP	314,813,237,996	14,006,635,000	328,819,872,996	314,813,237,996	14,006,635,000	328,819,872,996	i	100.00%
	3	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,569,327,000		3,569,327,000	3,569,327,000	-	3,569,327,000	Ī	100.00%

Teguh Wibowo

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Balikpapan

NAMA TIMJA : Dukungan Manajerial PERIODE LAPORAN : Triwulan III / 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Survei kepuasan masyarakat layanan publik

Nama Indikator Kinerja : Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM

Balikpapan(Nilai)

T/D	Tahun 2025								Target
1 / K	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan	Tahun 2025	Tahun 2025
Target	88%	88 %	88 %	88 %					88
Realisasi	91,11%	95,87 %	95,87 %	92,06%					
% Capaian	103.53%	108,94 %	108,94 %	104,61 %					

Catatan:

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4

SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2 SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4 Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Penyelenggaran pelayanan publik memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Perubahan organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan yang semula dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan, sehingga diperlukan sosialisasi terhadap stakeholder pada organisasi baru.

2. Tugas dan Fungsi yang diampu

Berdasarkan Permen KP No. 16 Tahun 2024 Tentang kewenangan pembinaan dan pengendalian dalam rangka penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, yang terdiri dari CPIB (penangan), CPIB (pembenihan), CBIB, CPIB (pembuatan pakan), CPOIB, CDOIB, SKP, PPMMT dan Penerapan Distribusi Ikan.

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diampu oleh BPPMHKP saat ini terjadi kekurangan sumber daya manusia sehingga dalam pelaksanaannya tidak optimal.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pada BPPMHKP kurang memadai

5. Anggaran pelaksanaan kegiatan

Efisiensi pemanfaan anggaran berimbas pada tugas dan fungsi yang ampu

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan /kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/ dokumentasi

- 1. Melakukan kegaitan sosialisasi terkait perubahan organisasi, tugas dan fungsi serta hal hal lain yang berkaitan dengan organisasi BPPMHKP
- 2. Melakukan penataan sumber daya manusia berdasarkan analisa beban dalam menunjang tugas dan fungsi pada organisasi BPPMHKP
- 3. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan sehingga mendapatkan *feedback* dalam rangka peningkatan layanan terhadap masyarakat
- 4. Kombinasi metode pelaksanaan pengawasan dan pengendalian *onsite, self assesment* dan *remote* assessment dengan tidak mengurangi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan

Dokumentasi kegiatan:

Bukti dukung rincian kegiatan item 2 berupa **Surat Tugas Kepala Balai KIPM Balikpapan**, Nomor B./ BKIPM.BPN/ KP.440/ III /2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang susunan keanggotaan tim kerja lingkup Balai KIPM Balikpapan









Ket: Pendampingan secara langsung cara pengisian SKM kepada pelaku usaha





Ket : Kegiatan refreshment kepada petugas pelayanan melalui briefing pagi yang dilaksanakan setiap pagi di Kantor Balai KIPM Balikpapan







Ket : Melakukan publikasi prosedur layanan melalui media cetak dan media elektronik













Ket : Kegiatan sosialisasi kepada pengguna layanan yaitu dengan menjadi narasumber di kegiatan sosialisasi dengan instansi terkait dalam hal ini Diskan Kota samarinda dan Diskan Kab. Kutai Kertanegara dan pemilik unit pembenihan serta budidaya.

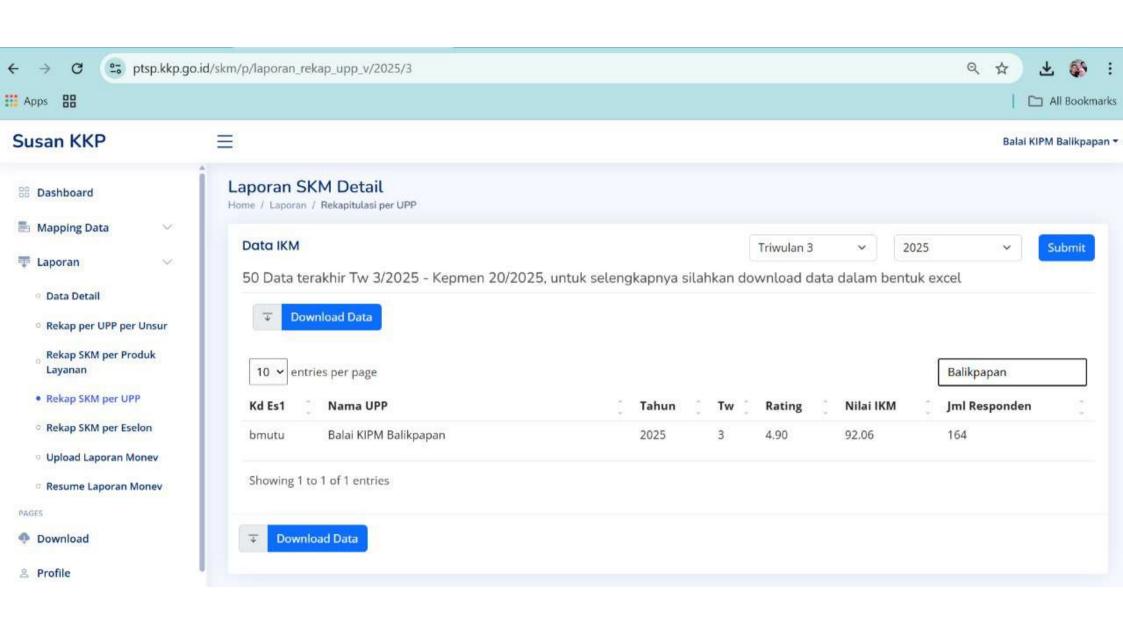
Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Pendampingan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	
secara langsung	
Penentuan standar layanan	Timja Dukungan Manajerial
Refreshment petugas pelayanan publik	

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
	Timja Dukungan Manajerial

Balikpapan, 10 Oktober 2025 Repala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : 3097/BPPMHKP.1/HM.450/X/2025 10 Oktober 2025

Sifat : Biasa Lampiran : 1 berkas

Hal : Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM) BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan III tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Target yang ditetapkan pada Triwulan III tahun 2025 adalah 88, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM:

- 1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan III Tahun 2025 adalah **95,56** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,82** dan mutu pelayanan diperoleh "A" kategori "Sangat Baik". Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 3.988 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) responden yang melakukan survei.
- Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) atau seluruhh UPP. Kemudian UPT Stasiun KIPM Bandung, Stasiun KIPM Merauke, dan Stasiun KIPM Merak memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah adalah Balai KIPM Surabaya I, Balai KIPM Denpasar, dan Balai Uji Standar KIPM.

- 3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 13 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori "Sangat Baik" dan 2 layanan mendapatkan kategori "Baik" yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (84,26) dan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (86,60).
- 4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur	Nilai
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	95,75
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	95,86
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	95,32
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	96,00
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,91
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	94,64
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	95,30
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,17
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	95,12

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspekaspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,



Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor: 3097/BPPMHKP.1/HM.450/X/2025

Tanggal: 10 Oktober 2025

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

- 1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
- 2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
- 3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
- 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
- 5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,



Woro Nur Endang Sariati

4

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025

					NILAI PEF	R-UNSUR I	_AYANAN				NILAI	MUTU	KINERJA	JUMLAH
NO	UPP	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	SKM	PELAYANAN	PELAYANAN	RESPONDEN
1	Stasiun KIPM Bandung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	А	Sangat Baik	10
2	Stasiun KIPM Merauke	99,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,04	100,00	100,00	99,79	А	Sangat Baik	26
3	Stasiun KIPM Merak	99,23	100,00	100,00	99,48	99,74	99,74	99,74	100,00	100,00	99,77	А	Sangat Baik	97
4	Stasiun KIPM Palu	100,00	100,00	100,00	98,89	100,00	99,44	98,89	100,00	100,00	99,69	А	Sangat Baik	45
5	Balai KIPM Banjarmasin	99,87	99,62	99,62	99,62	99,49	99,11	99,75	99,75	99,87	99,63	А	Sangat Baik	197
6	Stasiun KIPM Pekanbaru	99,68	99,52	99,36	99,36	99,52	99,36	99,36	99,52	99,52	99,47	А	Sangat Baik	314
7	Balai KIPM Entikong	99,58	99,17	99,17	99,58	99,17	99,58	99,17	99,58	98,33	99,26	А	Sangat Baik	60
8	Stasiun KIPM Gorontalo	98,94	99,47	99,47	99,47	99,47	98,94	98,94	99,47	98,94	99,23	А	Sangat Baik	47
9	Stasiun KIPM Pontianak	99,64	99,29	99,64	99,29	99,64	97,86	96,79	97,50	97,86	98,61	А	Sangat Baik	70
10	Balai KIPM Tarakan	99,21	99,21	98,81	98,41	97,62	97,22	98,41	98,81	98,81	98,50	А	Sangat Baik	63
11	Stasiun KIPM Ternate	98,39	97,98	97,98	98,79	98,79	99,19	98,39	98,39	97,58	98,39	А	Sangat Baik	62
12	Stasiun KIPM Aceh	96,43	98,21	98,21	100,00	98,21	98,21	96,43	98,21	98,21	98,02	А	Sangat Baik	14
13	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	97,87	97,34	97,87	97,34	97,87	96,81	97,34	97,34	97,34	97,46	А	Sangat Baik	47
14	Stasiun KIPM Tahuna	96,43	96,43	92,86	96,43	100,00	100,00	100,00	96,43	96,43	97,22	А	Sangat Baik	7
15	Stasiun KIPM Sorong	97,22	97,57	97,92	95,14	97,22	97,57	97,57	97,22	96,88	97,15	А	Sangat Baik	72

16	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	97,79	97,06	96,32	97,79	96,32	96,32	97,06	97,79	97,06	97,06	А	Sangat Baik	34
17	Balai KIPM Medan I	97,56	97,56	97,56	98,17	96,95	97,56	97,56	98,17	92,07	97,02	Α	Sangat Baik	41
18	Balai Besar KIPM Makassar	97,12	96,86	96,78	96,63	96,93	96,82	96,78	96,97	96,82	96,86	А	Sangat Baik	660
19	Stasiun KIPM Batam	97,41	97,41	98,28	97,41	97,41	95,69	94,83	97,41	94,83	96,74	А	Sangat Baik	29
20	Stasiun KIPM Padang	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	94,44	94,44	100,00	94,44	96,60	А	Sangat Baik	9
21	Stasiun KIPM Kendari	99,29	96,43	96,43	95,71	96,43	95,00	96,43	95,71	96,43	96,43	А	Sangat Baik	35
22	Balai KIPM Ambon	95,83	97,50	95,83	96,25	96,25	95,83	95,83	96,67	95,83	96,20	А	Sangat Baik	60
23	Balai KIPM Mataram	96,88	96,31	96,02	95,17	96,02	95,45	95,45	96,02	96,88	96,02	А	Sangat Baik	88
24	Stasiun KIPM Bima	97,02	96,43	95,24	95,24	95,83	95,83	97,62	95,83	94,05	95,90	А	Sangat Baik	42
25	Stasiun KIPM Medan II	95,74	96,28	93,62	97,34	95,21	95,74	96,28	96,81	95,74	95,86	А	Sangat Baik	47
26	Balai KIPM Surabaya II	97,73	97,93	96,49	97,73	97,31	97,31	97,73	97,73	79,34	95,48	А	Sangat Baik	121
27	Stasiun KIPM Palangkaraya	95,24	94,64	95,24	96,43	95,24	95,24	94,64	95,83	94,64	95,24	А	Sangat Baik	42
28	Stasiun KIPM Cirebon	96,70	95,60	95,33	96,15	95,05	93,41	93,41	94,78	93,96	94,93	А	Sangat Baik	91
29	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	100,00	93,75	94,44	А	Sangat Baik	24
30	Balai KIPM Tanjung Pinang	94,50	92,82	94,31	94,68	93,00	91,88	91,70	94,50	93,75	93,46	А	Sangat Baik	268
31	Stasiun KIPM Palembang	84,97	97,98	85,48	97,60	97,85	85,10	96,97	97,47	97,47	93,43	А	Sangat Baik	198
32	Balai KIPM Jakarta II	93,85	93,44	93,44	94,67	92,62	94,67	92,21	92,62	93,03	93,40	А	Sangat Baik	61
33	Stasiun KIPM Mamuju	96,88	87,50	96,88	90,63	93,75	96,88	90,63	90,63	93,75	93,06	А	Sangat Baik	8

34	Pusat Manajemen Mutu	93,10	92,24	91,38	96,55	93,10	91,38	93,10	92,24	93,10	92,91	Α	Sangat Baik	29
35	Stasiun KIPM Kupang	92,59	93,10	93,79	92,07	92,76	92,59	92,76	92,59	92,93	92,80	А	Sangat Baik	145
36	Stasiun KIPM Bau-Bau	92,11	92,76	92,76	93,42	91,45	92,76	93,42	92,76	92,76	92,69	А	Sangat Baik	38
37	Stasiun KIPM Yogyakarta	97,06	94,85	92,65	89,71	92,65	91,91	90,44	94,12	90,44	92,65	А	Sangat Baik	34
38	Balai Besar KIPM Jakarta I	95,61	93,24	92,23	93,92	92,23	90,88	91,22	93,24	90,54	92,57	А	Sangat Baik	74
39	Balai KIPM Manado	92,65	92,65	93,38	92,65	93,38	90,44	91,91	92,65	93,38	92,57	А	Sangat Baik	34
40	Stasiun KIPM Bengkulu	94,44	91,67	89,81	92,59	92,59	89,81	93,52	96,30	91,67	92,49	А	Sangat Baik	27
41	Balai KIPM Semarang	93,21	91,79	92,86	93,93	93,21	89,29	91,79	93,21	92,14	92,38	А	Sangat Baik	70
42	Balai KIPM Balikpapan	93,29	91,46	92,84	91,92	92,68	90,70	90,55	93,14	91,92	92,06	А	Sangat Baik	164
43	Stasiun KIPM Jambi	93,75	84,38	93,75	91,67	97,92	85,42	89,58	93,75	91,67	91,32	А	Sangat Baik	24
44	Balai KIPM Jayapura	92,59	88,89	90,74	91,67	91,67	90,74	87,04	90,74	92,59	90,74	А	Sangat Baik	27
45	Balai KIPM Lampung	91,43	92,14	88,57	91,43	90,00	90,00	90,71	91,43	90,00	90,63	А	Sangat Baik	35
46	Balai UJi Standar KIPM	93,55	91,94	91,13	91,13	88,71	88,71	89,52	91,13	89,52	90,59	А	Sangat Baik	31
47	Balai KIPM Denpasar	90,05	89,81	90,51	89,81	90,05	90,51	89,35	91,44	91,44	90,33	А	Sangat Baik	108
48	Balai KIPM Surabaya I	91,35	90,09	90,09	91,35	91,04	87,74	88,21	90,57	89,94	90,04	А	Sangat Baik	159

Hasil Pelaksanaan SKM Berdasarkan Produk Layanan BPPMHKP

NO	DDODUK LAVANAN	JUMLAH			NILA	I RATA-F	ATA UNS	SUR LAY	ANAN			NILAI	MUTU	KINERJA PELAYANAN
NO	PRODUK LAYANAN RE	PRODUK LAYANAN RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	SKM	PELAYANAN	
1	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	3	100,00	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,07	А	Sangat Baik
2	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	2477	97,57	97,17	97,56	97,50	97,25	96,71	96,61	97,51	96,94	97,20	А	Sangat Baik
3	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	10	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	90,00	96,67	А	Sangat Baik
4	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	153	97,55	96,24	95,75	95,92	96,24	95,92	97,71	96,24	94,28	96,21	А	Sangat Baik
5	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	284	95,77	95,25	94,81	94,72	94,89	94,10	94,37	96,13	93,57	94,85	A	Sangat Baik
6	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	160	95,94	94,38	94,53	95,31	95,00	94,38	93,13	94,69	92,19	94,39	А	Sangat Baik
7	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (approval number)	29	93,10	92,24	91,38	96,55	93,10	91,38	93,10	92,24	93,10	92,91	A	Sangat Baik
8	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	421	89,13	95,43	88,95	94,48	95,13	88,36	94,77	95,49	93,35	92,79	А	Sangat Baik

	Seluruh layanan BPPMKP	3.988	95,75	95,86	95,32	96,00	95,91	94,64	95,30	96,17	95,12	95,56	A	Sangat Baik
13	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	3	91,67	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	84,26	В	Baik
12	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	45	89,44	84,44	86,11	85,00	88,89	85,00	85,00	88,89	86,67	86,60	В	Baik
11	Sertifikat keikutsertaan dan final report	8	93,75	90,63	90,63	87,50	84,38	87,50	87,50	90,63	87,50	88,89	А	Sangat Baik
10	Bahan acuan yang disertai dengan <i>Certificate of</i> <i>Analysis</i> (CoA)	7	92,86	89,29	85,71	92,86	89,29	89,29	85,71	89,29	89,29	89,29	A	Sangat Baik
9	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	388	91,49	90,72	90,08	90,85	90,59	89,82	89,82	90,40	89,69	90,39	А	Sangat Baik